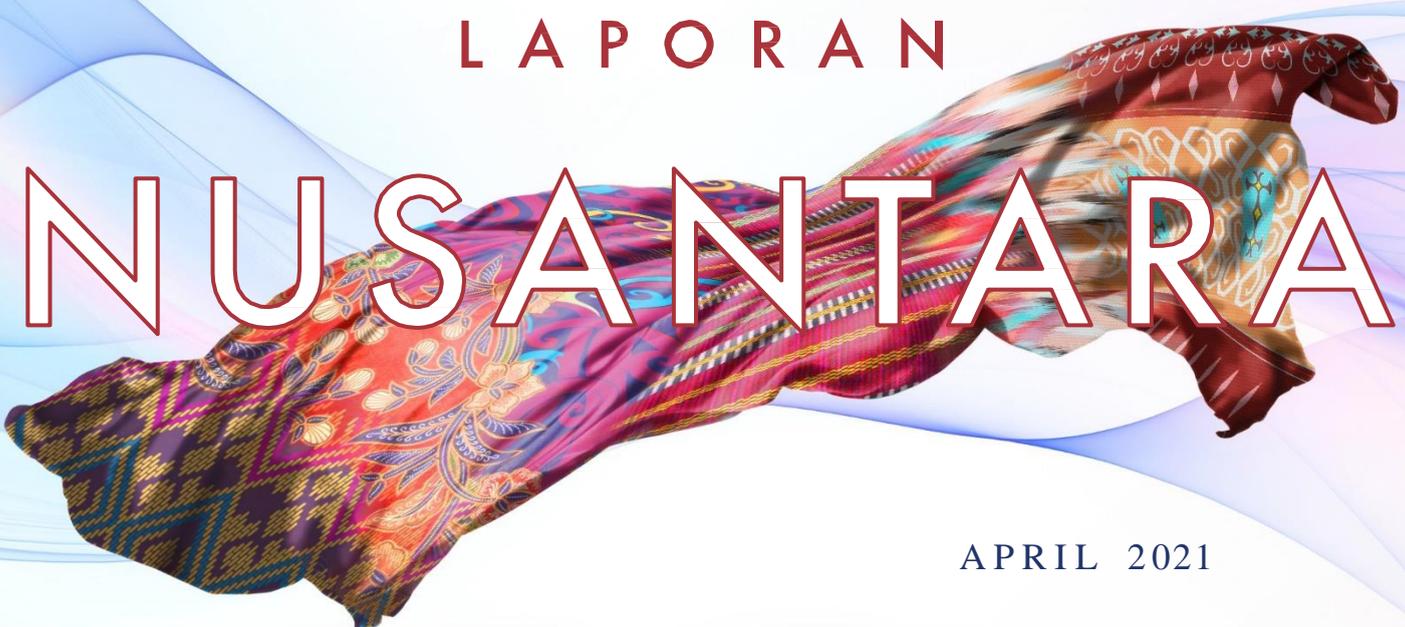


Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

L A P O R A N



# NUSANTARA

APRIL 2021

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

LAPORAN  
NUSANTARA

APRIL 2021

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	i
<b>PRAKATA</b>	iii
<b>BAGIAN I</b> Ringkasan Eksekutif	1
<b>BAGIAN II</b> Perkembangan Terkini dan Prospek Ekonomi Daerah	3
<b>BAGIAN III</b> Isu Strategis: Percepatan Implementasi Elektronifikasi dalam Mendorong Ekonomi dan Keuangan Digital serta Pertumbuhan Ekonomi Nasional	13
<b>BOKS 1</b> Digitalisasi Bantuan Sosial untuk Optimalisasi Efisiensi dan Efektivitas Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial	21
<b>BOKS 2</b> TP2DD Sebagai Katalisator Percepatan dan Perluasan Digitalisasi di Daerah	24



---

# Prakata

**B**erbagai aspek dalam perekonomian, termasuk dari perspektif kewilayahan, menjadi pertimbangan penting di dalam proses perumusan kebijakan di Bank Indonesia. Publikasi Laporan Nusantara ini merupakan pandangan Bank Indonesia terhadap dinamika perekonomian dalam perspektif spasial yang disarikan dari hasil pembahasan yang komprehensif antara Dewan Gubernur dengan seluruh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah. Asesmen perekonomian spasial dalam publikasi ini didasarkan pada perkembangan perekonomian di lima wilayah, yakni Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara (Balinusra), dan Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua).

Laporan Nusantara dipublikasikan secara triwulanan oleh Bank Indonesia pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai dinamika terkini dan prospek perekonomian daerah. Publikasi Laporan Nusantara edisi kali ini juga mengangkat isu strategis mengenai “Percepatan Implementasi Elektronifikasi dalam Mendorong Ekonomi dan Keuangan Digital serta Pertumbuhan Ekonomi Nasional”. Upaya untuk mempercepat dan memperluas elektronifikasi terus ditempuh oleh Bank Indonesia guna mengoptimalkan pesatnya arus digitalisasi dan perkembangan teknologi, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, inklusif dan berkelanjutan melalui integrasi ekonomi dan keuangan digital.

Sebagai penutup, kami berharap buku Laporan Nusantara ini dapat memberi manfaat dan masukan bagi para pemangku kepentingan dan pemerhati ekonomi daerah, sebagai salah satu kontribusi Bank Indonesia dalam pembangunan ekonomi daerah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati langkah kita bersama untuk berkarya demi nusa dan bangsa, membangun untuk Indonesia Maju.

**Jakarta, 28 April 2021**

*Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter*

**Aida S. Budiman**  
Asisten Gubernur

---

*"Halaman ini sengaja dikosongkan"*

# BAGIAN 1

## Ringkasan Eksekutif

**Proses pemulihan ekonomi di seluruh wilayah diperkirakan terus berlanjut pada awal 2021.** Permintaan eksternal yang terus meningkat pada triwulan I 2021, terutama dari Tiongkok dan Amerika Serikat, dengan disertai harga yang meningkat mendukung perbaikan kinerja ekspor daerah. Lebih lanjut, perkembangan ekspor yang positif tersebut menopang perbaikan kinerja lapangan usaha (LU) *tradable* di daerah, seperti pertambangan di Sulampua, industri pengolahan di Jawa, serta industri pengolahan berbasis sumber daya alam (SDA) di Sumatera dan Kalimantan. Sementara itu, perbaikan konsumsi domestik diperkirakan berlanjut secara gradual sejalan dengan mobilitas masyarakat yang membaik, meskipun masih terbatas, karena penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sejumlah daerah. Kenaikan ekspor dan perbaikan konsumsi juga mendorong kinerja investasi nonbangunan, terutama dengan peningkatan kapasitas produksi manufaktur di berbagai daerah. Berlanjutnya berbagai proyek Pemerintah juga mendukung perbaikan kinerja investasi bangunan pada awal 2021. Sementara konsumsi pemerintah diperkirakan ditopang stimulus fiskal Pemerintah Pusat di tengah masih terbatasnya realisasi fiskal Pemerintah Daerah.

**Perbaikan permintaan eksternal menopang kinerja LU utama daerah, terutama LU primer dan sekunder berorientasi ekspor.** Pada awal 2021, kinerja LU Pertanian didukung oleh berlangsungnya panen tabaka dan naiknya permintaan industri makanan berorientasi ekspor terhadap bahan baku dari subLU Perkebunan. LU Pertambangan berorientasi ekspor juga menopang perbaikan pertumbuhan, meskipun terdapat kendala produksi batu bara yang bersifat temporer. Permintaan eksternal juga mendorong kinerja LU Industri Pengolahan, di tengah permintaan domestik yang pulih secara bertahap. Sejalan dengan kinerja investasi, kinerja LU Konstruksi ditopang oleh berlanjutnya pengerjaan proyek-proyek Pemerintah. Sementara itu, perbaikan kinerja LU Perdagangan dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Akmamin) diperkirakan berlangsung secara gradual, sejalan dengan kinerja permintaan domestik dan aktivitas pariwisata nasional.

**Ke depan, perbaikan ekonomi daerah diperkirakan terus berlanjut dengan akselerasi pemulihan paling cepat terutama di wilayah Sulampua.** Ekspor produk SDA maupun manufaktur akan terus menguat sejalan dengan meningkatnya aktivitas industri Tiongkok dan pulihnya

permintaan domestik Amerika Serikat. Dari sisi domestik, konsumsi swasta akan membaik sejalan dengan meluasnya program vaksinasi dan disiplin dalam penerapan protokol COVID-19, serta ekspansi stimulus fiskal daerah yang semakin akseleratif pada paruh kedua 2021. Demikian pula investasi, terutama didorong oleh kelanjutan proyek hilirisasi di Sulampua dan perbaikan kinerja manufaktur di Jawa, serta kenaikan alokasi belanja infrastruktur Pemerintah. Dengan perkembangan tersebut, sejumlah LU utama di daerah akan membaik, namun LU terkait pariwisata di wilayah Balinusra akan pulih relatif paling lambat sejalan dengan aktivitas pariwisata oleh wisatawan mancanegara yang masih mengalami tekanan sebagaimana terjadi di negara lain. Dengan perkembangan terkini perekonomian di berbagai daerah tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan pada 2021 diperkirakan berada pada kisaran 4,1%-5,1%.

**Respons kebijakan fiskal daerah berperan penting dalam mendukung perbaikan ekonomi ke depan.** Di tengah upaya percepatan program vaksinasi dan disiplin penerapan protokol kesehatan untuk mendorong perbaikan konsumsi domestik, upaya untuk mendorong investasi perlu terus diperkuat termasuk dukungan stimulus fiskal pusat dan daerah. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia terus mendorong elektronifikasi transaksi Pemerintah (ETP) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, inklusif, dan berkelanjutan. Berbagai program elektronifikasi yang mencakup bansos, transaksi Pemda, transportasi, dan sektor ritel lainnya terus dilakukan untuk mendorong berkembangnya ekosistem transaksi pembayaran berbasis digital. Bahasan lebih detail mengenai elektronifikasi transaksi Pemerintah, termasuk perkembangan akselerasi elektronifikasi di sektor transportasi dan sektor ritel lainnya, akan diulas lebih dalam pada Bagian III Isu Strategis "Percepatan Implementasi Elektronifikasi dalam Mendorong Ekonomi dan Keuangan Digital serta Pertumbuhan Ekonomi Nasional".

**Di sisi inflasi, hingga akhir triwulan I 2021 inflasi di seluruh wilayah tercatat tetap rendah.** Rendahnya realisasi inflasi tersebut dipengaruhi oleh melambatnya inflasi di wilayah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, di tengah meningkatnya inflasi di Sulampua dan Balinusra, terutama didorong oleh kenaikan tekanan inflasi kelompok *volatile food* (VF). Ke depan, tekanan inflasi diperkirakan tetap terkendali di seluruh wilayah dalam rentang sasaran inflasi 3,0%±1%. Bank Indonesia terus berkomitmen menjaga

stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan melalui TPIP di tingkat pusat dan TPID di tingkat daerah dalam menjaga inflasi IHK sesuai kisaran targetnya, guna mendukung terjaganya daya beli masyarakat dan berjalannya proses transisi pemulihan ekonomi. Dalam jangka pendek, koordinasi dengan pemerintah juga difokuskan pada upaya mengendalikan inflasi pada HBKN Ramadhan dan Idul Fitri. Dalam jangka menengah-panjang, strategi pengendalian inflasi akan tetap difokuskan pada upaya mengatasi isu struktural untuk meningkatkan kesinambungan pasokan sepanjang waktu (disparitas antarwaktu), kelancaran distribusi antar daerah (disparitas antardaerah), serta efisiensi rantai distribusi, termasuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi baik di sisi produksi dan akses pemasaran.

## BAGIAN 2

# Perkembangan Terkini dan Prospek Ekonomi Daerah

### Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Perbaikan ekonomi di berbagai daerah diperkirakan terus berlangsung di berbagai daerah. Permintaan eksternal yang terus meningkat pada triwulan I 2021, terutama dari Tiongkok dan Amerika Serikat, dengan disertai harga yang meningkat mendukung perbaikan kinerja ekspor daerah. Lebih lanjut perkembangan ekspor yang positif tersebut menopang perbaikan kinerja lapangan usaha (LU) *tradable* di berbagai daerah, seperti pertambangan di Sulampua, industri pengolahan di Jawa, serta industri pengolahan berbasis sumber daya alam (SDA) di Sumatera dan Kalimantan. Sementara itu, perbaikan konsumsi domestik diperkirakan berlanjut secara gradual sejalan dengan mobilitas masyarakat yang membaik, meskipun masih terbatas karena penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sejumlah daerah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah yang ditopang stimulus fiskal Pemerintah Pusat di tengah masih terbatasnya realisasi fiskal Pemerintah Daerah. Dengan perkembangan terkini dinamika perekonomian di berbagai daerah tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan pada 2021 diperkirakan berada pada kisaran 4,1%-5,1%.

### Kinerja Permintaan

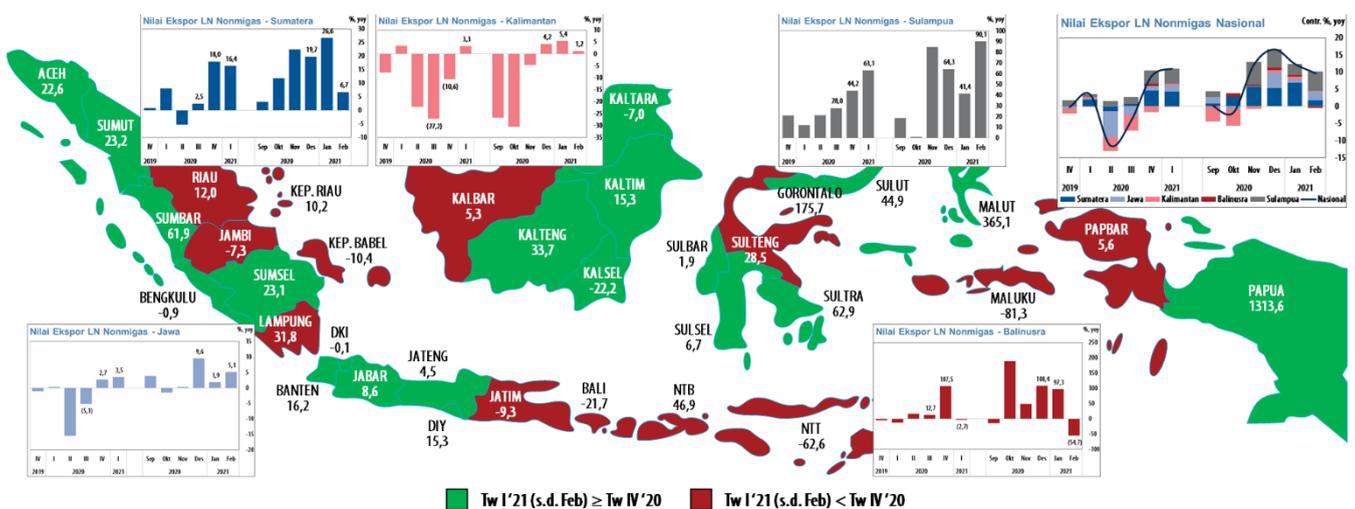
#### Ekspor Luar Negeri

#### Kinerja ekspor nonmigas di berbagai daerah terus

**membaik, ditopang permintaan Tiongkok dan Amerika Serikat (AS).** Ekspor komoditas SDA masih tumbuh cukup kuat di luar Jawa meski terdapat kendala produksi, antara lain tingginya curah hujan, yang menahan perbaikan lebih lanjut di beberapa wilayah. Demikian halnya dengan ekspor produk manufaktur Jawa yang mulai menunjukkan perbaikan. Membaiknya permintaan ekspor nonmigas dari Tiongkok berdampak positif pada perbaikan kinerja ekspor Sumatera, Kalimantan, dan Sulampua. Sementara permintaan ekspor dari AS cenderung memengaruhi kinerja ekspor nonmigas Jawa. Selain kedua negara tersebut, perbaikan kinerja ekspor pada awal 2021 juga didukung permintaan dari India dan beberapa negara ASEAN.

#### Kinerja ekspor tetap tumbuh positif pada triwulan I 2021 di sebagian besar wilayah.

Ekspor Sumatera pada triwulan I 2021 terus melanjutkan tren pertumbuhan positif yang berlangsung sejak triwulan IV 2020, meski cenderung melambat. Permintaan *Crude Palm Oil* (CPO) dari Tiongkok, India, dan Pakistan, disertai harga yang meningkat menjadi penopang utama kinerja ekspor Sumatera. Secara nilai, kenaikan pertumbuhan ekspor CPO Sumatera pada awal 2021 lebih tinggi jika dibandingkan pola historis pada kondisi normal<sup>1</sup>. Meski demikian, kendala produksi akibat tingginya curah hujan pada awal tahun 2021 menahan perbaikan kinerja ekspor Sumatera lebih lanjut. Selain CPO, kinerja ekspor batubara serta *pulp* dan *waste paper* juga membaik ditopang permintaan Tiongkok.



Sumber: Bea Cukai, diolah (data triwulan I 2021 s.d. Feb'21)

Gambar II.1. Peta Pertumbuhan Ekspor Non Migas Daerah Triwulan I 2021 (%yoy)

<sup>1</sup> Rata-rata pertumbuhan 2017-2019 untuk periode yang sama

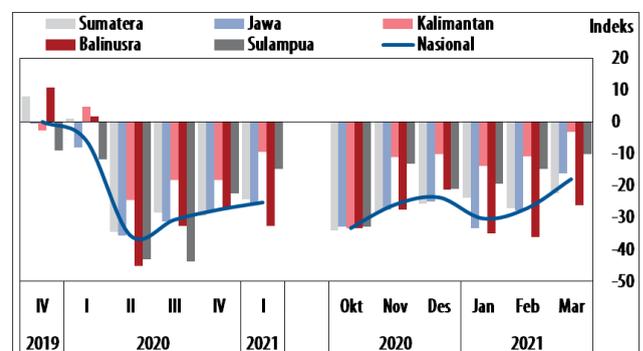
Demikian halnya dengan ekspor komoditas karet Sumatera ke Jepang yang juga terus melanjutkan perbaikan sejalan dengan peningkatan kinerja industri di negara tersebut. Kenaikan permintaan Tiongkok untuk komoditas CPO dan batubara juga menopang perbaikan ekspor Kalimantan, di tengah tingginya curah hujan yang memengaruhi aktivitas produksi batubara dan briket pada awal tahun. Di Jawa, perbaikan kinerja industri pengolahan terutama pada ekspor alas kaki dari Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah untuk tujuan Amerika Serikat, serta ekspor otomotif tujuan ASEAN yang mulai menunjukkan perbaikan. Kinerja ekspor wilayah Sulampua terus menunjukkan pertumbuhan positif sejak tahun 2020, ditopang berbagai komoditas besi baja ke Tiongkok. Selain itu, kapasitas produksi konsentrat tembaga yang meningkat di Papua mendorong kenaikan ekspor konsentrat tembaga ke Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Hal yang sebaliknya terjadi di Balinusra, yang mengalami penurunan produksi konsentrat tembaga karena dilakukannya *maintenance* sehingga mengakibatkan ekspor berkontraksi. Meski demikian, ekspor beberapa komoditas perikanan menahan kontraksi yang lebih dalam pada triwulan I 2021 di wilayah tersebut.

**Ke depan, perbaikan permintaan eksternal diperkirakan terus berlanjut, terutama dari Tiongkok dan AS, sehingga akan berdampak positif pada kinerja ekspor luar negeri nonmigas di seluruh seluruh wilayah.**

Peningkatan aktivitas industri Tiongkok akan mendorong kebutuhan energi listrik, sehingga ekspor batubara Sumatera dan Kalimantan diperkirakan terus membaik. Hal ini juga didukung dengan kuota produksi batubara nasional yang ditetapkan lebih tinggi dari tahun 2020. Ekspor CPO di kedua wilayah tersebut juga diperkirakan menguat seiring naiknya permintaan dan perbaikan produktivitas tanaman kelapa sawit. Permintaan Tiongkok terhadap komoditas besi baja Sulampua diperkirakan tetap kuat sepanjang 2021, didukung peningkatan kapasitas produksi industri besi baja, termasuk beroperasinya beberapa industri besi baja baru di wilayah tersebut. Kenaikan permintaan besi baja Tiongkok dipengaruhi oleh solidnya kinerja industri properti dan akselerasi kinerja manufaktur yang didorong baik permintaan domestik maupun ekspor. Ekspor konsentrat tembaga juga diperkirakan turut menopang kinerja ekspor Sulampua, yang didukung dengan berlanjutnya target peningkatan kapasitas produksi pada 2021. Pemulihan permintaan AS diperkirakan terus mendorong perbaikan ekspor Jawa, khususnya untuk produk-produk manufaktur padat karya seperti alas kaki, serta tekstil dan produk tekstil. Di sisi lain, ekspor Balinusra diperkirakan cenderung tertahan akibat kendala produksi dan *recovery rate* tambang tembaga NTB yang diperkirakan menurun sesuai siklusnya pada 2021.

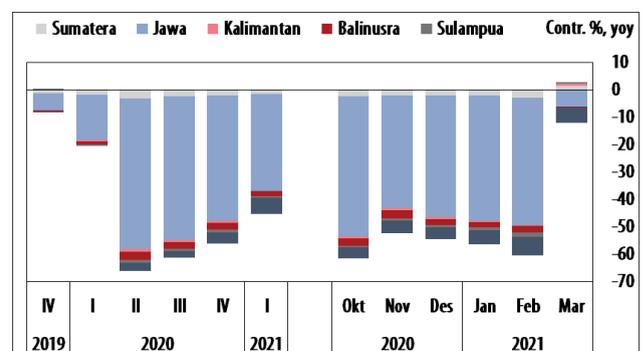
## Konsumsi Swasta

**Konsumsi swasta diperkirakan membaik di seluruh wilayah meski masih cenderung terbatas.** Hal ini sejalan dengan masih terbatasnya mobilitas masyarakat di tengah upaya Pemerintah yang terus melakukan akselerasi program vaksinasi nasional. Perbaikan mobilitas masyarakat yang terbatas dipengaruhi penerapan protokol kesehatan yang diiringi perluasan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro, namun di sisi lain berhasil menghambat penambahan kasus harian COVID-19 di seluruh wilayah. Perkembangan kasus COVID-19 yang cenderung menurun tersebut berdampak positif pada perbaikan ekspektasi masyarakat pada Maret 2021 di seluruh wilayah (Grafik II.1). Demikian halnya dengan perbaikan indeks ketersediaan lapangan kerja dan indikator lapangan kerja di seluruh wilayah (Grafik II.2).



Sumber: Bank Indonesia

Grafik II.1. Indeks Keyakinan Konsumen



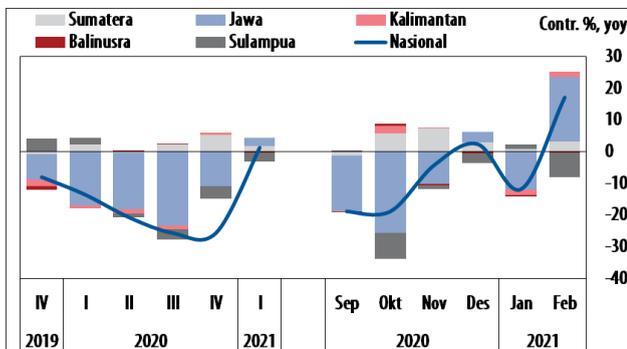
Sumber: Bank Indonesia

Grafik II.2. Indikator Ketersediaan Lapangan Kerja

**Proses pemulihan konsumsi swasta diperkirakan terus berlanjut secara keseluruhan tahun 2021.** Implementasi vaksinasi dan disiplin dalam penerapan protokol Covid-19 tetap diperlukan untuk mendukung percepatan perbaikan mobilitas dan konsumsi swasta secara bertahap. Secara spasial, pemulihan konsumsi swasta di wilayah Balinusra diperkirakan relatif lebih lambat dibandingkan wilayah lainnya, seiring tekanan yang cukup dalam pada LU terkait aktivitas pariwisata.

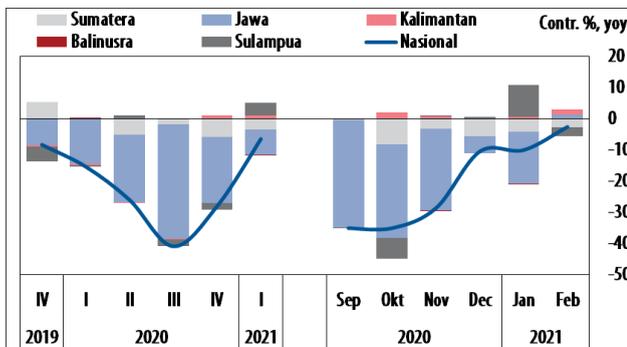
## Investasi

**Perbaikan permintaan eksternal dan domestik mendukung kinerja investasi yang membaik secara gradual.** Perkembangan ini terindikasi dari indikator impor barang modal di daerah yang membaik pada triwulan I 2021 (Grafik II.3). Investasi nonbangunan di Jawa yang membaik diperkirakan terutama pada industri elektronik, transportasi, serta industri kertas. Sementara di Sulampua, investasi nonbangunan ditopang kelanjutan investasi sejumlah industri baja. Beberapa investasi lain juga menjadi penopang perbaikan investasi di wilayah lainnya, seperti industri migas di Kalimantan, serta proyek kelistrikan di Sumatera. Di sisi lain, perkembangan investasi bangunan diperkirakan ditopang berlanjutnya proyek konstruksi pemerintah di berbagai daerah. Kenaikan investasi bangunan terindikasi dari impor barang konstruksi yang membaik di sebagian besar wilayah (Grafik II.4).



Sumber: Bank Indonesia

Grafik II.3. Impor Barang Modal



Sumber: Bank Indonesia

Grafik II.4. Impor Barang Konstruksi

**Ke depan, perbaikan investasi di seluruh wilayah diperkirakan terus berlanjut secara keseluruhan 2021.** Perbaikan kinerja investasi Sulampua sejalan dengan berlangsungnya proses pembangunan smelter di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Sulawesi Selatan. Demikian halnya dengan investasi *underground* mining tambang tembaga di Papua yang juga masih akan berlangsung sepanjang 2021. Selain itu, penyelesaian proyek pembangunan kilang gas juga akan menjadi pendorong perbaikan, di samping beberapa proyek infrastruktur seperti perluasan bandara dan proyek

bandungan. Di Jawa, kelanjutan investasi beberapa industri otomotif dan relokasi sejumlah korporasi global diperkirakan menopang perbaikan investasi. Di samping itu, investasi hilirisasi di Sulampua dan di Kalimantan diperkirakan berlanjut, disertai investasi pertambangan migas Kaltim. Peningkatan investasi Sumatera antara lain terkait industri CPO, serta *pulp and waste paper* sejalan dengan perkiraan membaiknya kinerja ekspor, kelanjutan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), serta beberapa proyek pembangkit listrik. Di sisi lain, investasi Balinusra terutama akan ditopang proyek infrastruktur Pemerintah, di tengah perbaikan kinerja LU utama yang diperkirakan masih terbatas. Secara keseluruhan, prospek perbaikan kinerja investasi didukung oleh komitmen Pemerintah untuk terus melakukan reformasi struktural dengan memperbaiki iklim investasi melalui implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, yang dalam jangka pendek akan mulai menerapkan perizinan berbasis risiko secara *online* dan terintegrasi di seluruh daerah.

## Konsumsi Pemerintah – Fiskal Daerah

### Stimulus fiskal Pemerintah Pusat meningkat di tengah masih terbatasnya realisasi belanja Pemerintah Daerah.

Meningkatnya belanja Pemerintah Pusat di daerah pada awal tahun lebih tinggi dari pola historisnya terutama ditopang oleh belanja barang, bantuan sosial, belanja modal, dan belanja lainnya. Di sisi lain, realisasi belanja Pemerintah Daerah masih terbatas, antara lain dipengaruhi realisasi transfer ke daerah dan dana desa yang masih lambat sampai dengan Februari 2021, terutama untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik khususnya terkait Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Umum (DAU) (Tabel II.1). Meski demikian, realisasi penyaluran Dana Desa (DD) meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, terutama untuk jaring pengaman sosial kepada keluarga miskin yang belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah. Lebih lanjut, penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) juga tumbuh lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya karena penyaluran kurang bayar DBH.

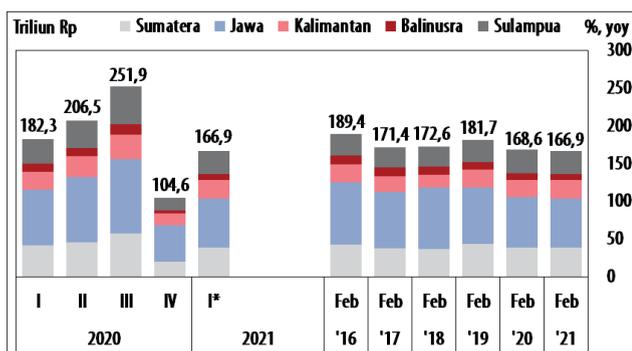
Tabel II.1. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

TKDD (Triliun Rp)	Perpres 72/2020	APBN 2021	PMK 17/2021	% Realisasi s.d. Feb 2020	% Realisasi s.d. Feb 2021	Realisasi Feb 2021 (yoy)
TRANSFER KE DAERAH	692,7	723,5	708,5	16,8%	14,0%	-14,5%
I. Dana Perimbangan	653,4	688,7	674,2	17,8%	14,7%	-14,5%
A. Dana Transfer Umum	470,8	492,3	479,8	22,2%	20,6%	-5,5%
1. Dana Bagi Hasil (DBH)	86,4	102,0	102,0	7,8%	11,0%	68,1%
2. Dana Alokasi Umum (DAU)	384,4	390,3	377,8	25,4%	23,2%	-10,6%
B. Dana Transfer Khusus	183,0	196,4	194,4	6,3%	0,3%	-95,8%
1. Dana Alokasi Khusus Fisik	53,8	65,2	63,6	0,0%	0,0%	-
2. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	128,8	131,2	130,8	9,0%	0,4%	-95,8%
II Dana Insentif Daerah	18,5	13,5	13,5	0,0%	0,0%	-
III Dana Otsus dan Dals DIY	20,9	21,3	20,8	0,0%	0,0%	-
DANA DESA	71,2	72,0	72,0	2,2%	5,3%	138,8%
TKDD	763,9	795,5	780,5	15,4%	13,2%	-12,4%

Sumber: Kemenkeu

**Belanja pemerintah daerah secara bertahap diperkirakan terakselerasi, terutama pada paruh kedua 2021.** Data sementara mengindikasikan persentase realisasi

belanja fiskal daerah secara agregat hingga triwulan I 2021 lebih lambat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Masih terbatasnya realisasi belanja fiskal daerah ini antara lain dipengaruhi realisasi TKDD sampai dengan Februari 2021 yang belum optimal, proses *refocusing* anggaran untuk penanganan COVID-19, proses adaptasi sistem keuangan baru yang lebih terintegrasi. Selain itu, pada awal tahun 2021 terdapat sejumlah daerah yang mengalami keterlambatan dalam penyampaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini juga tercermin dari posisi dana milik Pemda di perbankan pada Februari 2021 yang juga lebih rendah dibandingkan rata-rata tiga tahun terakhir. (Grafik II.5). Meski demikian, akselerasi realisasi fiskal Pemda diperkirakan akan terus meningkat terutama pada paruh kedua 2021 sejalan dengan agregat APBD yang meningkat lebih tinggi dibandingkan 2020. Kenaikan tersebut tidak hanya bersumber dari dana transfer, namun juga pendapatan asli daerah sejalan dengan perbaikan aktivitas ekonomi. Ke depan, penerapan sistem keuangan daerah baru yang lebih terintegrasi akan dapat mendorong proses transaksi keuangan di daerah secara lebih cepat dan efisien.



Sumber: Bank Indonesia  
\* s.d. Feb 2021

Grafik II.5. DPK Pemda

## Kinerja Lapangan Usaha

### Pertanian

**Kinerja positif Lapangan Usaha (LU) Pertanian diperkirakan terus berlanjut di berbagai daerah sentra.**

LU Pertanian diperkirakan ditopang produksi tanaman bahan makanan yang cenderung meningkat seiring dengan masuknya musim panen padi dan jagung yang dimulai pada triwulan I 2021, antara lain di Jawa Barat, Jawa Timur, serta beberapa provinsi di luar Jawa seperti Sulawesi Selatan dan Gorontalo. Peningkatan produksi terutama dipengaruhi oleh kenaikan luas lahan pertanian, sejalan dengan upaya Pemerintah untuk terus meningkatkan produksi pangan domestik. Di sisi lain, produksi hortikultura diperkirakan melambat seiring berlalunya musim panen bawang merah dan intensitas curah hujan yang tinggi mengakibatkan penurunan kuantitas dan kualitas panen khususnya aneka

cabai, seperti yang terjadi di Jawa Timur. Sementara itu, produksi sawit dan karet alam di Sumatera juga diperkirakan melambat sering berakhirnya musim panen raya dan musim trek yang mulai berlangsung di beberapa daerah.

**Secara keseluruhan tahun, sebagian besar wilayah memperkirakan kinerja LU Pertanian tumbuh lebih baik dari 2020 dengan didukung peningkatan produksi.**

Produksi tanaman bahan makanan diperkirakan meningkat, antara lain didukung program *food estate* yang beberapa diantaranya telah berproduksi seperti di Kalimantan. Produksi perkebunan sawit di Sumatera dan Kalimantan juga diperkirakan meningkat seiring hasil *replanting* yang mulai menghasilkan. Prospek peningkatan produksi juga didukung kenaikan harga, sejalan dengan peningkatan permintaan produk turunan CPO (Tabel II.2). Dorongan produksi komoditas perkebunan di Sumatera juga akan bersumber dari peningkatan produksi karet seiring dengan membaiknya permintaan ekspor yang akan didorong oleh prospek perbaikan penjualan kendaraan bermotor di pasar global.

Tabel II.2. Pasokan dan Permintaan Minyak Sawit Indonesia

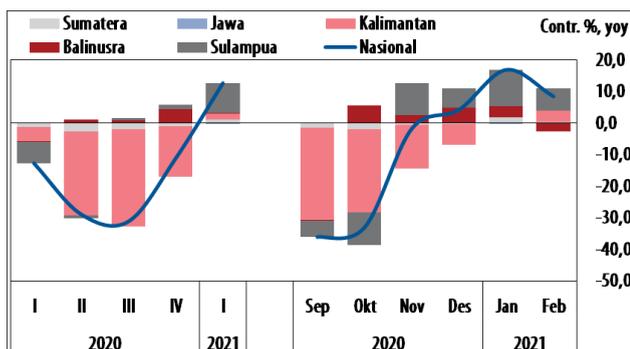
	2019 (Ribu Ton)	2020 (Ribu Ton)	2021p (Ribu Ton)
Produksi CPO	47.180	47.034	49.000
Produksi CPKO	4.648	4.549	4.932
Konsumsi Domestik	16.747	17.349	18.504
- Produk Pangan	9.860	8.428	8.700
- Industri	6.887	8.921	9.804
Ekspor	37.389	34.007	37.500

Sumber: GAPKI

### Pertambangan

**LU Pertambangan di Sulampua, Kalimantan dan Sumatera diperkirakan membaik, sejalan dengan kenaikan permintaan eksternal.** Permintaan global, khususnya dari Tiongkok, yang membaik disertai harga yang meningkat memengaruhi kinerja berbagai komoditas pertambangan nonmigas terutama batubara dan konsentrat tembaga, meskipun di beberapa daerah menghadapi kendala produksi antara lain karena faktor tingginya intensitas hujan pada awal tahun. Di Sumatera dan Kalimantan, perbaikan kinerja LU Pertambangan terutama ditopang batubara untuk memenuhi peningkatan permintaan Tiongkok dan harga yang meningkat sejalan dengan meningkatnya aktivitas pembangkit listrik dan industri baja di negara tersebut. Selain batubara, produksi komoditas timah di Sumatera juga diperkirakan meningkat sejalan dengan meningkatnya kebutuhan produk elektronik global. Di Sulampua, kinerja LU Pertambangan diperkirakan melanjutkan pertumbuhan positif didorong perbaikan kinerja produksi tembaga. Kapasitas produksi tambang

tembaga bawah tanah di Papua telah membaik sejak 2020, sehingga dapat memenuhi kenaikan permintaan eksternal serta domestik, khususnya smelter tembaga di Jawa Timur. Peningkatan kebutuhan nikel sebagai bahan baku industri besi baja di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara juga diperkirakan menopang kinerja LU Pertambangan di Sulampua pada triwulan I 2021. Di sisi lain, LU Pertambangan Balinusra diperkirakan melambat, seiring turunnya produksi konsentrat tembaga antara lain karena proses *maintenance*, kuota ekspor yang telah mencapai maksimal pada Februari 2021, serta turunnya permintaan domestik dari smelter di Jawa.



Sumber: Bea Cukai, diolah

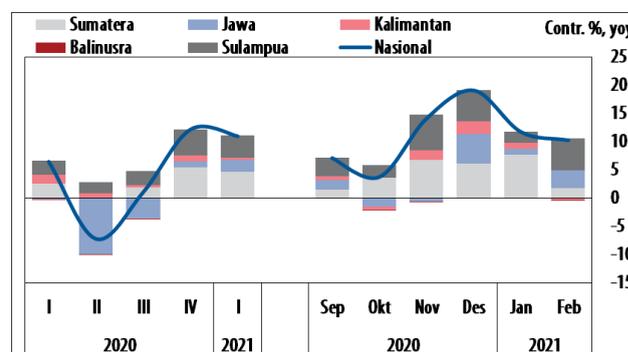
Grafik II.6. Ekspor Pertambangan

**Ke depan, perbaikan LU Pertambangan diperkirakan terus berlanjut secara keseluruhan 2021.** Perbaikan kinerja batubara di Kalimantan dan Sumatera di perkirakan terus berlanjut terutama dengan prospek ekspor yang meningkat disertai penambahan kuota ekspor 2021 dari 550 juta ton menjadi 625 juta ton, serta kenaikan harga batubara global sehingga menjadi insentif bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi sepanjang tahun 2021. Sementara kinerja LU pertambangan di Sulampua juga diperkirakan tumbuh positif dan lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Perkiraan ini didukung kenaikan kapasitas tambang tembaga bawah tanah Papua disertai kuota ekspor yang lebih tinggi dan harga komoditas tembaga di pasar global yang juga meningkat. Di sisi lain, kinerja LU Pertambangan di Balinusra diperkirakan melambat antara lain karena penurunan kadar mineral tembaga dan permintaan tembaga domestik pada tahun 2021, meskipun kuota ekspor meningkat.

### Industri Pengolahan

**Kinerja LU Industri Pengolahan diperkirakan membaik di berbagai wilayah terutama ditopang meningkatnya permintaan ekspor.** Peningkatan permintaan global terutama AS dan Tiongkok, mendorong ekspor manufaktur tumbuh positif di seluruh wilayah (Grafik II.7). Di Jawa membaiknya kinerja LU Industri Pengolahan terutama dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan ekspor dari Amerika Serikat, antara lain untuk produk alas kaki dan

produk tekstil meski masih relatif terbatas. Selain itu, permintaan domestik untuk produk otomotif juga mulai membaik pada triwulan I 2021 didukung insentif fiskal pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang mulai berlaku pada Maret 2021. Di Sumatera, perbaikan kinerja LU Industri Pengolahan ditopang industri makanan dan minuman khususnya CPO, serta industri *pulp* dan *waste paper* seiring dengan permintaan ekspor yang meningkat. Kendala produksi sawit yang sempat mengemuka pada awal tahun 2021 akibat tingginya curah hujan cenderung berdampak temporer bagi industri CPO secara keseluruhan. Perbaikan kinerja industri CPO juga diperkirakan menopang LU Industri Pengolahan di Kalimantan. Demikian halnya dengan industri alumina di Kalimantan yang diperkirakan membaik, sejalan dengan pemenuhan kontrak ekspor maupun kontrak dalam negeri. Di Sulampua, kinerja LU Industri Pengolahan diperkirakan tetap tumbuh positif, ditopang industri besi baja berorientasi ekspor untuk memenuhi permintaan Tiongkok. Perkiraan ini juga didukung peningkatan kapasitas produksi yang meningkat terutama di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara. Beberapa jenis industri makanan berorientasi domestik juga diperkirakan menunjukkan perbaikan meskipun relatif terbatas, seperti industri minyak kelapa dan tepung terigu.

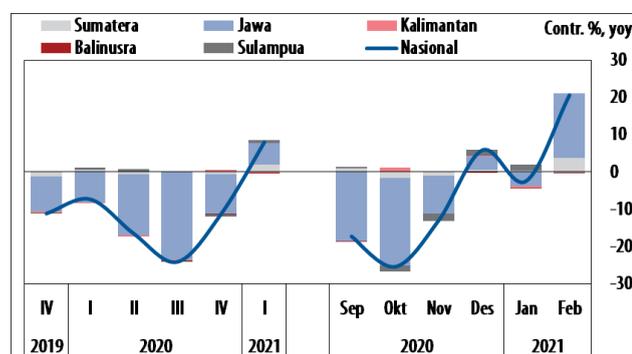


Sumber: Bank Indonesia

Grafik II.7. Ekspor Industri Pengolahan

**Ke depan, berlanjutnya perbaikan permintaan global serta membaiknya permintaan domestik diperkirakan dapat mendorong kinerja LU Industri Pengolahan di berbagai wilayah sepanjang 2021.** Hal ini terindikasi antara lain dari impor bahan baku yang menunjukkan perbaikan cukup signifikan pada triwulan I 2021 di sebagian besar wilayah (Grafik II.8). Selain itu, hasil survei kegiatan dunia usaha (SKDU) juga mengindikasikan meningkatnya aktivitas kegiatan produksi ke depan. Di Jawa, kinerja LU Industri Pengolahan diperkirakan membaik ditopang oleh berlanjutnya permintaan eksternal yang meningkat, khususnya AS untuk alas kaki dan produk tekstil. Perbaikan permintaan domestik juga diperkirakan turut mendorong kinerja LU Industri Pengolahan di Jawa lebih lanjut, termasuk permintaan otomotif. Beberapa rencana investasi yang

mulai direalisasikan pada 2021 diperkirakan turut menopang prospek LU Industri Pengolahan ke depan. Di Sumatera dan Kalimantan, kinerja industri CPO diperkirakan terus menguat sejalan dengan permintaan global yang meningkat, serta permintaan domestik terkait program B30, didukung pasokan bahan baku sawit yang juga membaik. Kinerja industri elektronik di Sumatera juga diperkirakan terus membaik secara gradual, seiring prospek permintaan global untuk produk-produk teknologi tinggi. Demikian halnya dengan industri alumina di Kalimantan yang diperkirakan membaik. Sementara itu, kinerja LU Industri Pengolahan Sulampua diperkirakan tetap kuat, didorong industri besi baja berorientasi ekspor yang disertai berlanjutnya penambahan kapasitas produksi antara lain di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara.



Sumber: Bank Indonesia

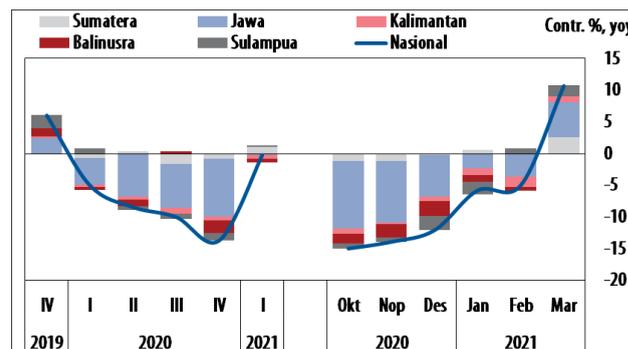
Grafik II.8. Impor Bahan Baku

## Konstruksi

**Perbaikan kinerja LU Konstruksi pada awal 2021 diperkirakan ditopang berlanjutnya proyek infrastruktur pemerintah di berbagai daerah.** Penyelesaian pengerjaan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan disertai adanya upaya percepatan pengadaan proyek infrastruktur Pemerintah di berbagai daerah diperkirakan berdampak positif pada kinerja LU Konstruksi. Sejalan dengan itu, realisasi beberapa proyek konstruksi swasta juga menjadi pendukung perbaikan kinerja LU Konstruksi. Kinerja LU Konstruksi yang membaik, terindikasi dari peningkatan penjualan semen (Grafik II.9) dan pembiayaan kredit perbankan.

**Penyelesaian PSN di daerah dan kenaikan alokasi belanja modal Pemerintah akan mendorong perbaikan LU Konstruksi di berbagai daerah hingga akhir 2021.** Pemerintah menargetkan 33 proyek PSN selesai pada 2021 (Grafik II.10), lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Sejalan dengan itu, dukungan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur yang lebih tinggi pada 2021 di berbagai wilayah diperkirakan turut mendorong kinerja LU Konstruksi. Beberapa proyek infrastruktur berskala besar yang diperkirakan menjadi pendorong LU Konstruksi di daerah sepanjang 2021, antara lain penyelesaian Jalan Tol

Trans Sumatera (JTS) di Sumatera, proyek infrastruktur transportasi MRT Fase II, LRT Jabodebek, jalan tol menuju Patimban di Jawa, proyek pendukung aktivitas pariwisata di Balinusra seperti ruas jalan Singaraja-Mengwitani, penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di NTT (Puncak Waringin, Batu Cermin, Bukit Pramuka) serta infrastruktur pendukung Mandalika di NTB. Selain itu, beberapa kebijakan insentif untuk pembelian rumah seperti penurunan *Loan to Value (LTV)* dan insentif pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) diperkirakan berdampak positif bagi permintaan untuk properti.



Sumber: Kemenperin dan Kemendag, diolah

Grafik II.9. Penjualan Semen



Sumber: KPPIP

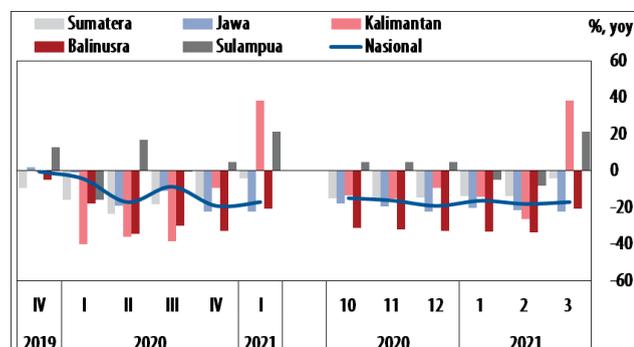
Grafik II.10. Perkembangan Penyelesaian PSN

## Perdagangan

**Perbaikan kinerja LU Perdagangan diperkirakan berlanjut di seluruh wilayah meski masih terbatas.** Hal ini terindikasi dari penjualan eceran yang membaik di hampir semua wilayah meski masih dalam fase pertumbuhan yang negatif, terutama di Balinusra dan Jawa (Grafik II.11). Hasil *liaison* kepada para pelaku usaha perdagangan di berbagai daerah yang mengindikasikan adanya perbaikan aktivitas usaha perdagangan. Namun, berlanjutnya PPKM di sejumlah daerah membatasi perbaikan mobilitas masyarakat lebih lanjut di seluruh wilayah.

**Perbaikan LU Perdagangan ke depan di berbagai wilayah diperkirakan membaik sejalan pemulihan konsumsi swasta.** Perluasan program vaksinasi di daerah dan disiplin penerapan protokol kesehatan berperan penting untuk mendorong perbaikan LU perdagangan di

seluruh wilayah. Berbagai kebijakan insentif yang ditempuh untuk mendorong konsumsi seperti pelonggaran uang muka kredit pembelian kendaraan bermotor dan potongan PPNBM bagi pembelian produk mobil dengan syarat tingkat kandungan produk dalam negeri, diperkirakan dapat menjadi pendorong perbaikan penjualan mobil di daerah.

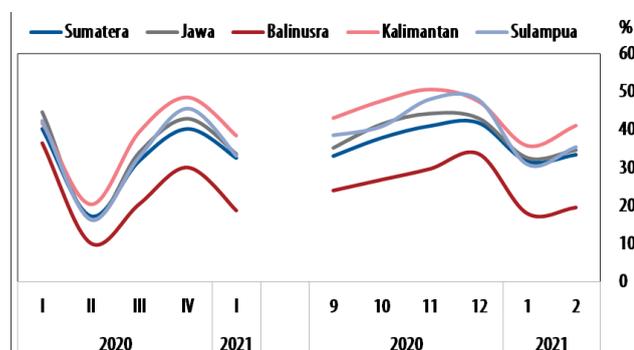


Sumber: Bank Indonesia

Grafik II.11. Penjualan Eceran

### Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman (Akmamin)

**Kinerja LU Akmamin diperkirakan cenderung masih terbatas sejalan dengan aktivitas pariwisata yang belum pulih di seluruh daerah.** Hasil *liaison* dengan otoritas pengelola bandara internasional mengindikasikan penerbangan internasional hingga Maret 2021 masih terbatas, sejalan dengan kebijakan restriksi yang masih berlaku di negara utama pasar wisatawan mancanegara. Hal tersebut berdampak pada jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada pintu masuk utama di daerah belum menunjukkan perbaikan berarti. Kondisi tersebut, tidak hanya dialami oleh Indonesia, namun juga negara *peers* di ASEAN. Lebih lanjut, data tingkat penghunian kamar (TPK) di seluruh wilayah masih sangat rendah terutama di wilayah Balinusra, mengindikasikan masih terbatasnya perbaikan LU Akmamin di daerah (Grafik II.12).

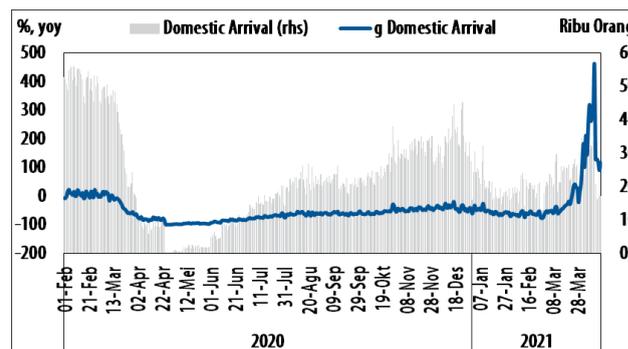


Sumber: BPS, diolah

Grafik II.12. Tingkat Penghunian Kamar (TPK)

**Perbaikan LU Akamamin ke depan diperkirakan mengandalkan pergerakan wisatawan nusantara.** Hal ini terindikasi dari aktivitas perjalanan penumpang domestik di beberapa bandara utama daerah yang mulai membaik

meski masih terbatas dan fluktuatif (Grafik II.13). Hasil *liaison* dengan pelaku industri penerbangan mengindikasikan pemesanan tiket penerbangan domestik menunjukkan perbaikan terutama dari Jakarta ke beberapa tujuan seperti Bali, Medan dan Surabaya. Perbaikan *confidence* masyarakat dengan akselerasi program vaksinasi yang didukung penerapan protokol kesehatan melalui sertifikasi *cleanliness, health, safety and enviromental friendly* (CHSE) yang lebih luas berperan penting untuk menopang perbaikan kinerja LU Akmamin ke depan, termasuk penyelenggaraan agenda kegiatan MICE dan beberapa *event* berskala nasional.



Sumber: PT. Angkasa Pura I dan II

\*6 Bandara : Bali, NTB, Sumut, Kepri, Sulut, Sulsel

Grafik II.13. Kedatangan di Bandara Domestik

### Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

**Perkembangan ekonomi dan keuangan digital terus meningkat seiring akseptasi dan preferensi masyarakat untuk melakukan transaksi nontunai.** Pertumbuhan tersebut tercermin dari nilai transaksi Uang Elektronik (UE) pada triwulan I 2021 sebesar Rp61,35 triliun atau meningkat 42,46% (yoy). Di samping itu, nilai transaksi melalui Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) khususnya kartu ATM dan kartu debit pada periode Januari hingga Maret 2021 tercatat Rp1.813 triliun, tumbuh 2,13% (yoy). Volume transaksi *digital banking* juga menunjukkan peningkatan 39,6% (yoy) atau mencapai 1.493,5 juta transaksi pada triwulan I 2021 sejalan dengan preferensi masyarakat untuk berbelanja secara daring. Sementara dari sisi nominal, transaksi *digital banking* juga tumbuh 22,7% (yoy), senilai Rp8.223 triliun. Lebih lanjut, digitalisasi juga terus didorong dengan implementasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada UMKM, serta elektronifikasi transaksi keuangan di daerah melalui optimalisasi perluasan implementasi bantuan sosial (Bansos) nontunai, Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), dan elektronifikasi transportasi. Sementara itu, pada triwulan I 2021 transaksi pembayaran nontunai nilai besar melalui Sistem BI *Real Time Gross Settlement* (RTGS) dan nilai kecil melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) juga menunjukkan kinerja yang membaik

meski sedikit tertahan sejalan dengan permintaan domestik yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19. Transaksi menggunakan SKNBI menunjukkan pertumbuhan 1,5% (yoy) meski secara volume sedikit berkontraksi sebesar 4% (yoy). Sementara itu, nominal transaksi yang menggunakan RTGS terpantau tumbuh 27,3% (yoy) meskipun secara volume berkontraksi sebesar 5,3% (yoy).

## Inflasi Daerah

**Inflasi di seluruh wilayah pada triwulan I 2021 tetap rendah sejalan perbaikan permintaan yang masih terbatas dan pasokan yang memadai.** Secara nasional, inflasi IHK pada triwulan I 2021 tercatat 1,37% (yoy), lebih rendah dari triwulan IV 2020 yang sebesar 1,68% (yoy). Realisasi inflasi tersebut dipengaruhi oleh tetap rendahnya tekanan kenaikan harga di seluruh komponen disagregasi inflasi, yaitu inflasi inti, *administered prices* (AP), dan *volatile food* (VF). Rendahnya realisasi inflasi tersebut dipengaruhi oleh melambatnya tekanan inflasi di wilayah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, di tengah meningkatnya tekanan inflasi di Sulampua dan Balinusra karena kenaikan inflasi kelompok *volatile food* (VF). Meskipun demikian, secara keseluruhan realisasi inflasi di seluruh wilayah tercatat tetap rendah dan berada di bawah batas bawah sasaran inflasi nasional.

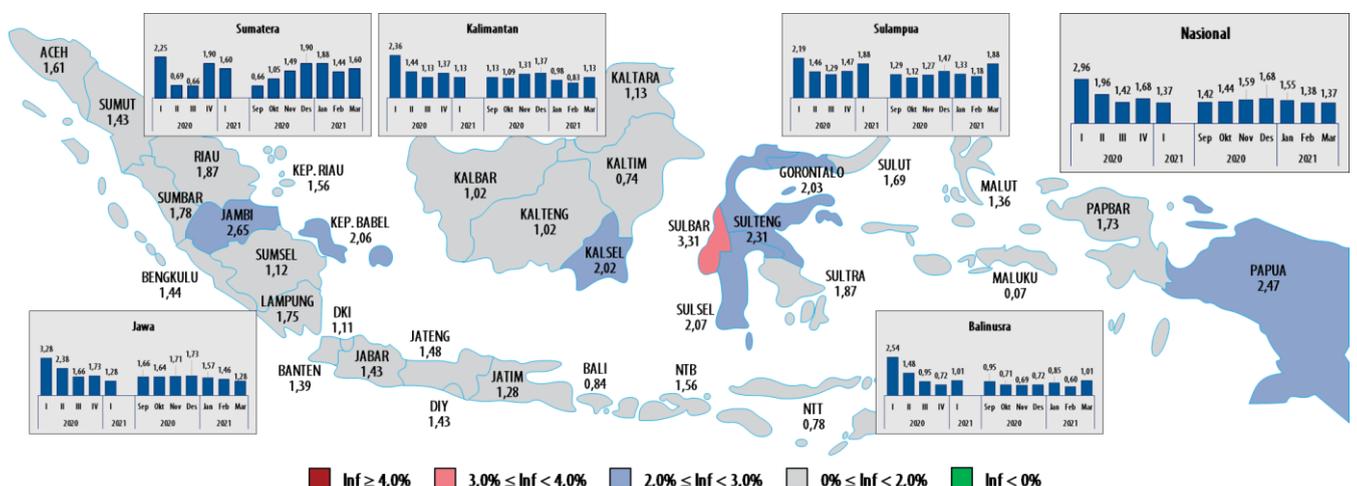
**Inflasi inti tetap rendah di seluruh wilayah.** Perkembangan ini sejalan dengan pengaruh permintaan domestik yang belum kuat, stabilitas nilai tukar yang terjaga, dan konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi pada kisaran target. Di samping itu, rendahnya tekanan inflasi inti turut dipengaruhi inflasi komoditas emas perhiasan yang turun di seluruh wilayah seiring perlambatan inflasi emas global.

**Tekanan inflasi VF juga tetap terkendali meskipun di Sulampua dan Balinusra menunjukkan peningkatan.**

Tekanan inflasi VF yang tetap terkendali terutama ditopang oleh deflasi beras yang terjadi di sebagian besar wilayah, kecuali Kalimantan, seiring masuknya musim panen raya periode awal tahun. Lebih lanjut, tekanan inflasi dari kelompok komoditas hortikultura juga menurun terutama bawang merah seiring dengan masuknya masa panen di Januari-Februari dan bawang putih seiring tercukupinya pasokan impor. Meskipun demikian, penurunan lebih lanjut tertahan oleh kenaikan inflasi cabai rawit yang meningkat tinggi di Maret, terutama di Sulampua dan Balinusra, akibat produksi yang tidak optimal di daerah sentra karena intensitas hujan yang cukup tinggi di awal tahun.

**Inflasi kelompok AP juga tetap rendah di seluruh wilayah.** Hal ini terutama dipengaruhi oleh tarif angkutan udara yang masih mencatat deflasi terutama di Sulampua dan Balinusra, meskipun tidak sedalam periode sebelumnya. Inflasi AP lebih dipengaruhi oleh tarif cukai rokok, meski tidak setinggi kenaikan di awal tahun 2020. Selain itu, terdapat penyesuaian tarif sejumlah ruas tol di Jawa yang diimplementasikan sejak awal tahun 2021.

**Ke depan, inflasi tahun 2021 diperkirakan tetap terkendali dalam rentang sasaran inflasi nasional 3,0% ± 1%.** Perkiraan ini sejalan dengan prospek permintaan yang membaik seiring dengan berlanjutnya vaksinasi nasional dan program perbaikan ekonomi nasional (PEN). Inflasi inti pada 2021 diperkirakan tetap terkendali sejalan dengan ekspektasi yang tetap terjangkau dalam rentang sasaran. Bank Indonesia tetap berkomitmen menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah. Sinergi kebijakan melalui TPIC di tingkat pusat dan TPID di tingkat daerah akan terus diperkuat untuk menjaga inflasi IHK sesuai kisaran targetnya, guna mendukung terjaganya daya beli masyarakat dan berjalannya transisi pemulihan ekonomi.



Sumber: BPS, diolah

Gambar II.2. Peta Inflasi Daerah, Triwulan I 2021 (yoy)

Dalam jangka pendek, koordinasi dengan pemerintah juga difokuskan pada upaya mengendalikan inflasi pada HBKN Ramadhan dan Idul Fitri. Dalam jangka menengah-panjang, strategi pengendalian inflasi akan tetap difokuskan pada upaya mengatasi isu struktural untuk meningkatkan kesinambungan pasokan sepanjang waktu (disparitas antarwaktu), kelancaran distribusi antar daerah (disparitas antardaerah), serta efisiensi rantai distribusi, termasuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi baik di sisi produksi dan akses pemasaran.

*"Halaman ini sengaja dikosongkan"*

## BAGIAN 3

# Isu Strategis: Percepatan Implementasi Elektronifikasi dalam Mendorong Ekonomi dan Keuangan Digital serta Pertumbuhan Ekonomi Nasional

### Latar Belakang

**Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, inklusif, dan berkelanjutan, Bank Indonesia mendorong elektronifikasi.** Langkah strategis ini diyakini akan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui perluasan akses keuangan (inklusi keuangan), peningkatan efisiensi, kesehatan fiskal, dan tata kelola. Upaya tersebut dilakukan melalui program elektronifikasi yang meliputi bansos, transaksi Pemda, transportasi, dan sektor ritel lainnya. Program-program tersebut diyakini sangat penting karena merupakan layanan publik, berdampak luas bagi masyarakat, dan berdampak signifikan dalam upaya pengembangan ekosistem digital. Hal ini juga sejalan dengan visi #1 *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 dalam mendorong transaksi pembayaran berbasis digital, yang dilakukan dengan melibatkan industri (*industrial approach*), mengedepankan kepentingan publik (*public interest approach*), dan sinergi (*collaborative approach*)

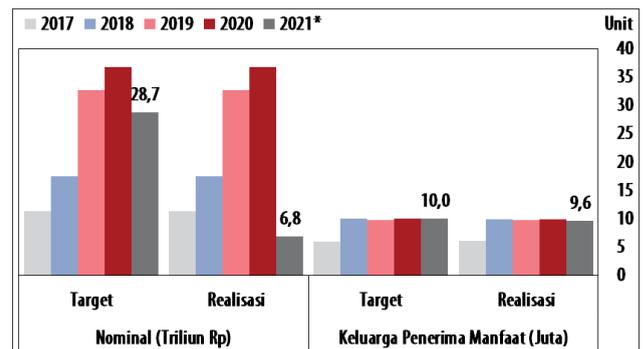
**Implementasi elektronifikasi dalam pelaksanaan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia sebagai respons terhadap tantangan pesatnya arus digitalisasi, perkembangan teknologi, serta perubahan kondisi dan aktivitas ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19.** Menjawab tantangan tersebut, Bank Indonesia melakukan berbagai upaya untuk mempercepat terciptanya ekosistem nontunai dan ekonomi keuangan digital melalui elektronifikasi (i) pembayaran *Government to Person*, yaitu penyaluran bantuan sosial (bansos), (ii) pembayaran *Person/Business to Government* atau sebaliknya, yaitu elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, serta (iii) pembayaran *Person to Business/Government*, yaitu elektronifikasi transportasi. Dalam mendorong ketiga program elektronifikasi tersebut, Bank Indonesia bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga dan otoritas terkait, pelaku industri, serta masyarakat. Sinergi dan kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat dan memperluas digitalisasi yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, inklusif dan berkelanjutan melalui integrasi ekonomi dan keuangan digital.

### Perkembangan Program Elektronifikasi

Sejak tahun 2019 Program elektronifikasi menjadi fokus utama Bank Indonesia terutama dalam bidang sistem pembayaran. Berbagai inisiasi kebijakan elektronifikasi menuju digital, inisiasi komitmen, inovasi produk layanan, serta implementasi elektronifikasi telah dilakukan. Hingga saat di tengah pandemi COVID-19, program elektronifikasi terus mengalami perkembangan yang cukup pesat seiring perubahan pola hidup masyarakat khususnya dalam aktivitas transaksi pembayaran dari tunai menjadi nontunai.

#### *Elektronifikasi Bantuan Sosial*

**Penyaluran bansos reguler secara umum telah berjalan dengan baik dan realisasi penyaluran setiap tahunnya hampir mencapai 100% dari target,** di tengah beberapa tantangan yang mengemuka, antara lain terkait *cleansing data* dan perubahan pola kebijakan (Grafik III.1 dan Grafik III.2). Penyaluran bansos tercatat secara optimal di beberapa wilayah di Indonesia diantaranya Kalimantan dan Balinusra, dengan penyerapan program sembako tahap I pada 2021 masing-masing mencapai 94,52% dan 94,74%, lebih tinggi dari angka serapan nasional yaitu sebesar 92,05%.



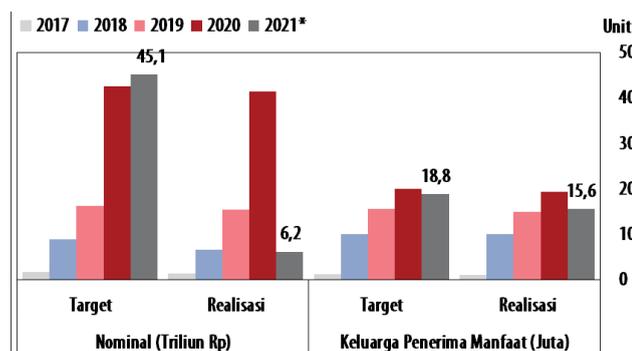
Sumber: Himbara

\*Realisasi s.d. tahap I 2021

**Grafik III.1.** Target dan Realisasi Penyaluran PKH

**Penyaluran bansos pemerintah pusat yang merupakan program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka penanggulangan dampak COVID-19.** Pelaksanaan penyaluran dilakukan melalui koordinasi yang erat antara Bank Indonesia bersama Tim Pengendali Bansos Nontunai untuk memastikan kesiapan semua pihak. Penyaluran Bansos Pemerintah Pusat telah dimulai sejak tahun 2020

berupa penyaluran Bansos Sembako untuk 1,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah Jabodetabek (disalurkan oleh PT. Pos) dan Bansos Tunai untuk 9 juta KPM di wilayah Non Jabodetabek (disalurkan oleh Himbara dan PT. Pos). Mengingat dampak pandemi COVID-19 masih dirasakan oleh masyarakat Indonesia, Pemerintah memperpanjang penyaluran Bansos Tunai sampai dengan April 2021 dengan target 10 juta KPM secara nasional (disalurkan oleh PT Pos). Target tersebut telah mencakup KPM penerima Bansos Sembako pada tahun 2020.



Sumber: Himbara

\*Realisasi s.d. Februari 2021

**Grafik III.2.** Target dan Realisasi Penyaluran Program Sembako

### Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

**Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) hingga Maret 2021 menunjukkan peningkatan, terutama pada transaksi pendapatan dan pemanfaatan kanal digital seperti QRIS.** Elektronifikasi pajak daerah mencapai 81,6%, meningkat dibandingkan posisi Desember 2020 sebesar 54,6% dan elektronifikasi retribusi daerah mencapai 53,9%, meningkat dibandingkan posisi Desember 2020 sebesar 22,1%. Capaian penerapan ETPD di wilayah Jawa merupakan capaian elektronifikasi pajak dan retribusi daerah tertinggi yakni masing-masing mencapai 94,0% dan 65,8%. Transaksi pendapatan terbanyak yang dielektronifikasi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak hotel dan restoran, serta reklame. Penggunaan kanal digital seperti QRIS telah diterapkan di 125 Pemerintah Daerah, meningkat dari 118 Pemerintah Daerah (Pemda) pada Desember 2020. Penerapan QRIS terbanyak oleh Pemda di wilayah Jawa merupakan yang terbanyak yakni mencapai 66 pemda. Transaksi pendapatan terbanyak yang menggunakan QRIS adalah pembayaran retribusi pasar, PKB, e-samsat, KIR dan pembayaran di daerah wisata. Sementara itu penggunaan *e-commerce* telah digunakan di 171 Pemda, meningkat dibanding posisi Desember 2020 sebesar 158 pemda, dengan capaian tertinggi di wilayah Jawa sebesar 75 Pemda. Namun, penggunaan *internet banking* oleh Pemda mengalami sedikit penurunan yakni menjadi 329 Pemda dari semula digunakan oleh 330 Pemda pada Desember 2020.

**Elektronifikasi belanja langsung mengalami sedikit penurunan, khususnya belanja pegawai, SP2D Online, Cash Management System (CMS), dan penggunaan internet banking.** Hal ini antara lain dipengaruhi oleh masih berjalannya proses transisi sistem informasi keuangan daerah yang lebih terintegrasi pada awal tahun. Penggunaan elektronifikasi transaksi belanja langsung mengalami penurunan menjadi 96,6% dibandingkan Desember 2020 yang sebesar 97,8%. Di sisi lain, elektronifikasi transaksi belanja tidak langsung sebesar 90,60% atau meningkat dibandingkan Desember 2020 sebesar 84,4%. Pemda di wilayah Balinusra merupakan Pemda dengan capaian elektronifikasi belanja langsung dan tidak langsung tertinggi mencapai 100%.

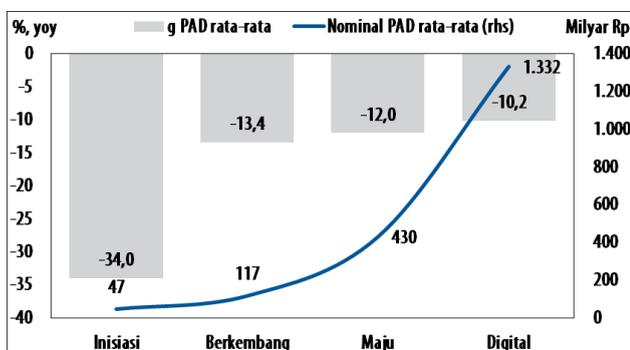
### Bank Indonesia lebih lanjut melakukan pemetaan terhadap 542 daerah di Indonesia dengan metode Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemda (IETPD).

Pemetaan ini dilakukan untuk mengidentifikasi kesiapan Pemda dalam melaksanakan ETPD. Metode pemetaan yang digunakan merupakan penyempurnaan dari metode sebelumnya yakni Indeks Capaian Elektronifikasi (ICE). Berbeda dari metode ICE yang bertujuan untuk mengetahui capaian tahapan elektronifikasi Pemda, IETPD bertujuan untuk mengukur upaya, kapasitas dan kapabilitas Pemda dalam menyediakan layanan ETPD yang didukung oleh infrastruktur telekomunikasi dan literasi masyarakat. Berdasarkan pemetaan tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut:

- Terdapat enam Pemda atau 1,04% dari keseluruhan daerah berada pada tahap inisiasi, yakni tahap awal dan mulai menginisiasi melakukan ETP untuk memenuhi transaksi yang diamanatkan dalam undang-undang, perpres maupun peraturan menteri seperti sistem informasi keuangan pemda dan *payroll* nontunai dan menggunakan kanal pembayaran paling dasar seperti *teller*.
- Sebanyak 200 Pemda atau 34,96% dari keseluruhan daerah berada pada tahap berkembang, yakni daerah yang telah memenuhi peraturan seperti digitalisasi belanja daerah dan pengembangan sistem informasi keuangan pemda serta mengembangkan ETP pada transaksi pendapatan dan belanja melalui beberapa kanal-kanal pembayaran yang tersedia.
- Terdapat 245 Pemda atau 42,83% dari keseluruhan daerah berada pada tahap maju, yaitu telah mengembangkan ETP pada kanal-kanal digital serta melakukan upaya lanjutan dari aspek *governance* berupa integrasi SP2D Online dan CMS, melakukan sosialisasi ETP kepada masyarakat, dan didukung infrastruktur komunikasi yang memadai.
- Terdapat 91 Pemda atau 16,78% dari keseluruhan daerah

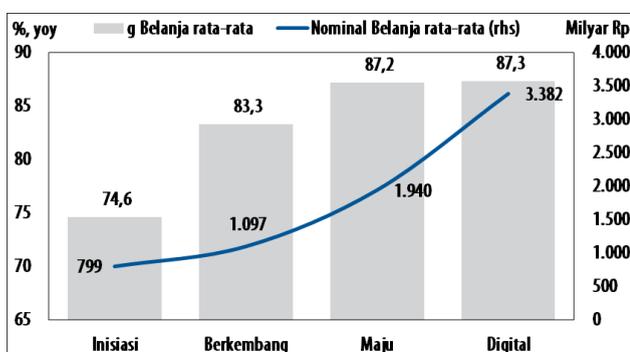
telah mencapai tahap digital, yaitu Pemda yang telah menggunakan transaksi nontunai pada hampir seluruh transaksi belanja dan pendapatannya, memiliki sistem informasi transaksi keuangan pemerintah daerah yang terintegrasi, aktif melakukan sosialisasi ETP kepada masyarakat dan didukung oleh infrastruktur komunikasi yang merata.

Berdasarkan asesmen Bank Indonesia, implementasi elektronifikasi mampu mendorong penguatan dan peningkatan aktivitas ekonomi di daerah. Daerah dengan IETPD yang lebih tinggi cenderung lebih resilien terhadap dampak COVID-19 pada Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan dapat merealisasikan anggarannya lebih tinggi dibandingkan daerah dengan capaian IETPD lebih rendah. Daerah dengan capaian IETPD lebih tinggi cenderung mengalami kontraksi PAD yang lebih rendah pasca COVID-19. Pemda yang telah mencapai tahap digital hanya terkontraksi rata-rata sebesar 10%, sedangkan daerah yang masih masuk tahap inisiasi rata-rata terkontraksi hingga mencapai 34% (Grafik III.3). Selain itu, Daerah dengan capaian IETPD yang lebih tinggi juga cenderung memiliki realisasi belanja yang lebih tinggi. Daerah yang telah mencapai tahap digital rata-rata merealisasikan 87% dari total pagu belanja pada tahun 2020, sedangkan daerah di tahap inisiasi rata-rata merealisasikan 75% dari total pagu belanja (Grafik III.4).



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik III.3. Capaian IETPD dan Pertumbuhan PAD



Sumber: Bank Indonesia

Gambar III.4. Capaian IETPD dan Realisasi Belanja

## Elektronifikasi Transportasi

**Selama hampir satu dekade, pemerintah, baik pusat maupun daerah bersama dengan Bank Indonesia bahu membahu mewujudkan transaksi pembayaran elektronik yang aman dan efisien di sektor transportasi.**

Upaya ini dilakukan melalui serangkaian regulasi. Perkembangan transaksi pembayaran di sektor transportasi juga tercermin, antara lain dengan ditetapkan standar teknis kartu cerdas dan *reader* nirkontak, implementasi interkoneksi dan interoperabilitas instrumen-kanal pembayaran melalui infrastruktur SP eksisting, serta inisiasi integrasi moda transportasi dengan pembayaran nontunai.

**Berbagai ketentuan yang diterbitkan dari tahun 2012 hingga 2018 tersebut menunjukkan upaya Pemerintah bersama BI untuk membangun aspek regulasi, aspek teknis, hingga penguatan aspek kelembagaan.**

Pada tahun 2018 hingga 2019, inisiasi awal integrasi moda mulai diluncurkan di Jakarta, yang diharapkan menjadi inspirasi dan dapat direplikasi di berbagai daerah. Ke depan, upaya integrasi moda transportasi yang ditandai dengan inisiasi pelaksanaan integrasi Jabodetabek pada tahun 2021 hingga 2022, akan diikuti dengan berbagai inisiasi perluasan serupa di berbagai daerah.

**Sejalan dengan inovasi teknologi, evolusi sistem pembayaran di sektor transportasi jalan tol terus mengalami perkembangan.**

Hal ini tercermin dari *roadmap* pembayaran di jalan tol yang terus mengedepankan sistem pembayaran yang efisien dan aman untuk pengguna jalan tol bertransaksi secara nontunai. Program transaksi nontunai di jalan tol efektif diterapkan pada 31 Oktober 2017, sehingga saat itu pembayaran nontunai jalan tol di Indonesia dapat mencapai 100% dalam waktu implementasi yang relatif singkat, yaitu lebih kurang tiga bulan sejak program diinisiasi. Selanjutnya, elektronifikasi di jalan tol terus mengalami perkembangan dengan dilakukannya integrasi ruas tol diikuti dengan uji coba penerapan teknologi nirsentuh secara bertahap. Ke depan, implementasi *multi-lane free flow* (MLFF) bertahap akan dimulai pada tahun 2022 hingga penerapan secara *full scale* pada tahun 2023. Pada 2023, implementasi MLFF diharapkan sudah memungkinkan pembayaran tarif tol secara *seamless*, otomatis dan tanpa henti namun tetap aman sehingga tidak ada lagi antrean di gerbang masuk maupun keluar jalan tol.

Sejak penerapan elektronifikasi pada 31 Oktober 2017, seluruh ruas tol sepanjang 2.346 km atau 59 ruas tol telah dioperasikan oleh 40 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dengan pembayaran menggunakan Uang Elektronik (UE) *chip based* dari 4 (empat) penerbit yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BCA. Transaksi UE *chip based* di jalan tol mendominasi

sekitar 80% total transaksi UE di sektor transportasi dan secara umum didominasi oleh Bank Mandiri dan diikuti oleh BRI, BCA, serta BNI. Pada tahun 2020 tercatat jumlah transaksi sebanyak 1,3 miliar transaksi dengan nilai sebesar Rp22 triliun. Transaksi terpantau mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat sebesar 1,8 miliar transaksi atau senilai Rp 26 triliun, karena adanya pembatasan sosial skala besar (PSBB) akibat pandemi COVID-19.

BI bersama dengan K/L terkait telah melakukan fasilitasi elektronifikasi transportasi melalui berbagai tahapan berupa inisiasi, perluasan, replikasi dan integrasi dengan perkembangan sebagai berikut:

- a. **Inisiasi:** Proses migrasi dari pembayaran tunai menuju nontunai pada GB Parking dan Pelindo II.
- b. **Perluasan:** Operator sudah melakukan elektronifikasi dan akan diperluas menggunakan SAM GPN pada ASDP, DAMRI, Perparkiran Bandara, Perum PPD.
- c. **Replikasi:** Operator sudah mengimplementasikan SAM GPN dan akan direplikasi di daerah pada Pelindo III dan *Secure Parking*.
- d. **Integrasi:** Integrasi moda transportasi meliputi infrastruktur dan sistem pembayaran pada moda transportasi Jabodetabek.

**Tantangan dalam penerapan elektronifikasi terutama pada kesepakatan bisnis.** Salah satunya dalam proses menyepakati skema harga, antara operator dengan *issuer*/penyedia jasa pembayaran yang memerlukan waktu lebih lama. Selain itu kendala kesiapan aspek teknis di lapangan yang disebabkan pandemi COVID-19 dan peran dari pemangku kepentingan yang masih perlu ditingkatkan untuk melakukan elektronifikasi secara menyeluruh. Di masa yang akan datang, diharapkan pembayaran jasa/tiket transportasi dapat diperluas menggunakan *any channel* dan *any instrument* dengan tetap mengacu pada ketentuan Bank Indonesia.

## Asesmen 3I dan 2K

Sebagai upaya *monitoring* elektronifikasi, asesmen dengan prinsip 3I dan 2K (Informasi dan Data, Implementasi, Infrastruktur, Koordinasi dan Ketentuan) terus dilakukan pada masing-masing program elektronifikasi. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian dan perlu ditindaklanjuti.

### *Elektronifikasi Bantuan Sosial*

Berdasarkan hasil survei pada *monitoring* bansos yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada tahun 2020, diperoleh hal-hal sebagai berikut:

#### Informasi dan data

**Mayoritas responden KPM telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik (97,3%) dan Nomor Induk Keluarga (NIK) - (99,6%).** Persentase tersebut mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2019, sehingga diharapkan dapat mendukung ketepatan sasaran penyaluran bansos serta mendukung upaya digitalisasi penyaluran bansos (G2P 4.0). Namun, kendala utama penyaluran Bansos berkaitan dengan data dan informasi KPM. Mengatasi hal ini maka Tim Pengendali Bantuan Sosial Nontunai (BSNT) terus melakukan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang antara lain tercermin dari peningkatan jumlah responden yang menerima dua jenis bantuan (Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako) melalui satu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Perbaikan ini ditujukan untuk memenuhi alokasi jumlah KPM tahun 2021, penanganan kendala dalam penyaluran bansos dan peningkatan ketepatan sasaran penyaluran bansos. Untuk mendukung perbaikan DTKS, terdapat beberapa upaya solusi yang dapat dilakukan a.l a) melakukan verifikasi dan validasi data KPM secara berkala; b) memastikan data KPM dari Kemensos telah *clean and clear*; c) Bank penyalur memadankan data dari Kemensos dengan data milik Dukcapil; dan d) mengupayakan integrasi data KPM.

#### Implementasi

**Mayoritas responden KPM menyatakan penyaluran bansos nontunai telah memenuhi prinsip 6T (tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat Administrasi).** Jumlah responden KPM yang menemui permasalahan terkait lupa PIN, sinyal, dan mesin EDC juga mengalami penurunan signifikan. Namun, dalam penyaluran bansos dengan menggunakan kartu masih terdapat kendala a.l a) proses pendataan calon penerima masih dilakukan secara manual; b) biaya yang dibutuhkan untuk melakukan proses cetak, perso dan distribusi kartu cukup tinggi; dan c) biaya investasi bank untuk penyediaan ATM dan EDC sangat tinggi.

#### Infrastruktur

**Masih terdapat wilayah penyaluran yang sulit sinyal (blankspot), meski jumlahnya telah berkurang.** Dalam memanfaatkan dana bantuan Program Sembako di wilayah *blankspot* pada e-Warong, pemanfaatan bantuan dapat dilakukan dengan didukung penggunaan teknologi VSAT, EDC *Wifi* dan EDC *Offline*. DKI Jakarta dan DI Yogyakarta menjadi provinsi yang tidak memiliki desa *blankspot* dalam penyaluran bansos nontunai, serta Banten yang hanya memiliki satu desa *blankspot* dengan memanfaatkan teknologi VSAT. Sementara di luar Jawa, daerah *blankspot* cenderung lebih banyak, terutama di Sulawesi Tengah (142 desa) dan Kalimantan Tengah (139 desa). Penyaluran bansos

di kedua provinsi tersebut didukung dengan penggunaan EDC *Offline* dan VSAT.

### Koordinasi

Koordinasi terus dilakukan secara intensif dengan berbagai pihak baik di tingkat pusat maupun daerah, terutama untuk menjaga kelancaran penyaluran bansos nontunai. Meski demikian, koordinasi dan kinerja tim koordinasi daerah maupun pusat masih perlu terus dioptimalkan, terutama terkait pendamping PKH dan Program Sembako.

### Ketentuan

Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada aspek ketentuan:

- a. Perlunya perluasan penyelenggara bansos untuk mendukung penyaluran di beberapa daerah yang menghadapi tantangan seperti di Aceh terkait penerapan Qanun/Perda Aceh yang membatasi hanya Lembaga Keuangan Syariah yang dapat beroperasi. Mengatasi hal ini, penyaluran bansos direncanakan untuk dialihkan kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) setelah BSI sudah siap menjadi penyalur dan mendapat surat penunjukan dari pemerintah.
- b. Perlunya dukungan ketentuan pemerintah yang mengakomodasi kebutuhan terkait penyaluran secara digital, termasuk tersedianya Petunjuk Teknis dan Pedoman Umum.

### Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Informasi dan data

Menindaklanjuti UU No.33 Tahun 2004, PP No.65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan PMK No 4/PMK.07/2011, seluruh Pemda diamanatkan untuk membuat Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagai media pelaporan perkembangan keuangan daerah kepada pemerintah pusat (Kemendagri). Lebih lanjut, untuk mengintegrasikan sistem keuangan daerah maka melalui Permendagri Nomor 70 tahun 2019 dilakukan inisiatif Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Secara umum, Permendagri tersebut mewajibkan seluruh sistem terkait Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah berbasis elektronik diintegrasikan dalam satu sistem yakni SIPD paling lama satu tahun sejak Permendagri diundangkan. Dalam proses implementasi SIPD, optimalisasi dukungan sistem dan aplikasi terus dilakukan, termasuk kesiapan sumber daya pelaksana di daerah, serta kesiapan infrastruktur Pemda dan BPD selaku bank pengelola RKUD. Hal ini mengingat proses integrasi SIPD akan memengaruhi akselerasi elektronifikasi transaksi belanja, seperti transaksi belanja langsung pegawai (*payroll*) dan SP2D *Online*, serta interkoneksi antara SP2D *Online*

dengan CMS bank pengelola RKUD.

### Implementasi

Pandemi Covid-19 yang diikuti dengan pergeseran perilaku digital masyarakat telah menghasilkan respons positif dari Pemda dan perangkat daerah lain untuk mempercepat dan memperluas penyediaan sistem layanan publik berbasis digital. Sebagai contoh, inovasi pembayaran pajak kendaraan bermotor berbasis online semakin terakselerasi di tengah pandemi. Sejumlah wilayah mencatat peningkatan utilisasi pembayaran berbasis *online* diantaranya Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Maluku, Lampung, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, DI Yogyakarta, dan Riau. Selain itu, inovasi dari sisi industri yang ditempuh di daerah juga mengemuka dalam mengakselerasi elektronifikasi, seperti *platform* aplikasi pajak dan retribusi daerah yang dikembangkan BPD Sulawesi Selatan. *Platform* yang berfungsi melakukan pengelolaan *cloud database* pajak dan retribusi daerah tersebut dapat terkoneksi antara satu modul dengan modul lainnya sehingga dapat terintegrasi secara digital dengan sistem informasi Pemda melalui API (*Application Programming Interface*). Ke depan aplikasi tersebut dapat dihubungkan dengan aplikasi belanja dan penerimaan pemda lainnya (e-samsat, samolnas, aplikasi parkir, dan lain-lain), termasuk dengan CMS perbankan.

### Infrastruktur

**BPD dengan level digital banking yang tinggi cenderung mengakselerasi implementasi ETPD.** Pemetaan terhadap level *digital banking* BPD dengan kondisi ETPD di Pemda-nya (yang dicerminkan dari nilai IETPD) menunjukkan bahwa Pemda dengan BPD yang memiliki layanan *digital banking* cenderung memiliki IETPD yang tinggi dalam kategori maju dan bahkan digital.

**Rata-Rata IETPD Pemda yang bekerja sama dengan e-commerce lebih tinggi daripada Pemda yang belum melakukan kerja sama.** Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa *e-commerce* menjadi kanal yang memperluas implementasi ETPD dan mampu mendorong suatu daerah untuk menjadi lebih digital. Kemudian pada daerah yang menerapkan kerjasama penerimaan daerah via *e-commerce* terindikasi dapat menahan laju kontraksi PAD lebih dalam karena membuka kanal penerimaan yang mudah diakses, khususnya dalam masa pandemi.

### Koordinasi

**Dalam rangka mendorong implementasi elektronifikasi, penguatan koordinasi baik di tingkat pusat maupun daerah perlu terus ditingkatkan.** Upaya penguatan koordinasi dilakukan di tingkat pusat melalui pembentukan Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah

(Satgas P2DD). Satgas P2DD resmi dibentuk melalui penerbitan Keppres No. 3 Tahun 2021 pada 5 Maret 2021 lalu. Sementara itu, sebagai upaya penguatan koordinasi di tingkat daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dibentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) melalui keputusan kepala daerah. Hingga 20 April 2021, telah terbentuk 217 TP2DD yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa Pemda di Indonesia bahkan telah berhasil membentuk 100% TP2DD, diantaranya DKI Jakarta, D.I Yogyakarta, Kep. Riau, dan Sulawesi Selatan.

## Ketentuan

**Dukungan perangkat regulasi, baik terkait kelembagaan maupun implementasi, di tingkat pusat dan daerah menjadi kritikal untuk akselerasi ETPD guna menjamin kepastian hukum dan standarisasi.** Setelah diterbitkannya Keppres No. 3 Tahun 2021 tentang Satgas P2DD, saat ini Satgas P2DD tengah mengakselerasi penerbitan payung hukum lainnya yakni Kepemenko tentang mekanisme dan tata kerja satgas P2DD, Permendagri yang memuat uraian tugas dan keanggotaan TP2DD, dan pedoman implementasi ETPD. Sementara itu, di tingkat daerah, sebanyak 28 Provinsi telah memiliki regulasi terkait ETPD. Namun penerbitan regulasi daerah di level kota dan kabupaten perlu menjadi prioritas mengingat masih banyak daerah yang belum dilengkapi regulasi ETPD, yaitu sebanyak 34% dan 46% dari total masing-masing Kota dan Kabupaten.

## Elektronifikasi Transportasi

Berdasarkan survei yang dilakukan di berbagai wilayah dalam kerangka asesmen 3I dan 2K, diperoleh hasil sebagai berikut:

### Informasi dan data

**Sektor transportasi:** Di wilayah Jabodetabek, pengelolaan informasi dan data akan dilakukan oleh lembaga *Electronic Fare Collection* (EFC), sedangkan di daerah (Sumsel, Bandung, Batam, dan Solo) integrasi masih terbatas pada integrasi fisik/ infrastruktur dan belum terdapat pengelola untuk melakukan integrasi.

**Jalan Tol:** Saat ini pengelolaan dilakukan oleh 40 BUJT. Pengelolaan akan dilakukan secara terpusat melalui Badan Usaha Pengelola (BUP) yang bertindak sebagai *Electronic Toll Collection* (ETC) yang mengelola seluruh data dan *payment* pada saat implementasi MLFF.

### Implementasi

Mayoritas responden di Jawa menyatakan bahwa di daerahnya sudah terdapat implementasi elektronifikasi transportasi. Salah satu contohnya adalah elektronifikasi pembayaran moda transportasi laut (penyebrangan) di

Tanjung Priok, Merak, Tanjung Emas, Tanjung Perak dan Ketapang. Selain Jawa, wilayah Indonesia lainnya juga telah menerapkan elektronifikasi di sektor transportasi, khususnya menggunakan QRIS seperti MuTrans, becak motor online di Tebing Tinggi, Sumatera Utara, penerapan e-ticketing berbasis QRIS pada Trans Batam, elektronifikasi parkir beberapa pusat perbelanjaan dan bandara di Kalimantan. Namun demikian, perluasan elektronifikasi transportasi perlu terus dilakukan, terutama di luar wilayah Jawa.

## Infrastruktur

Selain pemahaman terhadap nontunai yang masih relatif terbatas, infrastruktur sistem pembayaran (EDC dan *reader*) yang kurang memadai serta ketersediaan sarana *top up* dan penjualan UE di daerah yang terbatas menjadi kendala terbesar implementasi elektronifikasi transportasi di daerah.

## Koordinasi

Terdapat beberapa responden daerah yang menyatakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait belum dilakukan secara optimal, antara lain dengan Pemda, otoritas, perbankan, operator transportasi, penyedia sistem IT dalam rangka inisiasi SP nontunai layanan moda transportasi dikarenakan belum adanya rencana elektronifikasi transportasi di daerah.

## Ketentuan

Dukungan ketentuan di daerah terkait elektronifikasi (pembayaran nontunai) juga masih menjadi tantangan, terutama terkait dengan layanan moda transportasi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota

## Rencana Ke Depan

Berdasarkan perkembangan dan asesmen 3I dan 2K pada masing-masing program elektronifikasi, telah disusun beberapa rencana aksi baik jangka pendek (2021-2022) maupun menengah (2023-2025) untuk mempercepat implementasi elektronifikasi. Rencana aksi tersebut tentunya dilakukan dengan sinergi dan kolaborasi bersama Kementerian/Lembaga dan otoritas terkait, pelaku industri serta masyarakat.

## Elektronifikasi Bantuan Sosial

Kualitas data menjadi kunci utama dalam kesuksesan penyaluran bansos. Oleh karena itu, perbaikan kualitas data KPM menjadi fokus utama program elektronifikasi bansos dalam jangka pendek. Hal tersebut dilakukan dengan melanjutkan peningkatan kualitas data KPM menuju integrasi data dan informasi penerima manfaat. Sementara itu, dalam jangka pendek – menengah, upaya mendorong digitalisasi Bansos (G2P 4.0) untuk efektivitas dan efisiensi

penyaluran Bansos, antara lain melalui penyesuaian regulasi bansos yang mendukung digitalisasi akan terus dilakukan.

### Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

TP2DD diyakini mampu menjadi katalisator dalam mempercepat dan memperluas digitalisasi di daerah. Oleh karena itu, sepanjang tahun 2021 -2022, Bank Indonesia dan *stakeholders* terkait akan berupaya mengakselerasi pembentukan TP2DD dan mendorong implementasi P2DD antara lain penyusunan rencana aksi/program implementasi di daerah serta mendorong integrasi sistem informasi keuangan di daerah melalui SIPD.

Sementara itu, terdapat dua hal yang menjadi fokus utama dalam jangka pendek- menengah:

- a. Memperkuat sinergi dan implementasi program strategis Satgas P2DD, a.l penerbitan ketentuan turunan, implementasi IETPD, SIP2DD, & *championship*, serta sosialisasi dan edukasi.
- b. Mendorong perluasan digitalisasi pembayaran ETPD untuk optimalisasi efisiensi dan kemudahan pembayaran.

### Elektronifikasi Transportasi

Dari sisi elektronifikasi transportasi, berbagai upaya dilakukan sepanjang tahun 2021 hingga 2025 yakni sebagai berikut:

- a. Mendorong integrasi sistem & data pembayaran di sektor transportasi.
- b. Mendorong integrasi pembayaran antar moda transportasi dan implementasi bertahap pembayaran jalan tol nirsentuh (MLFF) yang sesuai dengan kebijakan dan ketentuan BI.
- c. Mengakselerasi digitalisasi pembayaran moda transportasi melalui perluasan instrumen dan kanal pembayaran yang terinterkoneksi dan interoperabel.

Selain rencana-rencana jangka pendek-menengah, upaya mendorong program elektronifikasi terus dilakukan dengan memperkuat koordinasi pusat-daerah, melakukan sosialisasi dan edukasi program elektronifikasi, melakukan *monitoring* dan tindak lanjut program elektronifikasi, termasuk *pilot project*, serta mendorong pengembangan ekosistem digitalisasi pembayaran.

Melalui sinergi dan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga dan otoritas terkait, pelaku industri dan masyarakat, rencana aksi dan upaya-upaya tersebut diharapkan mampu mempercepat implementasi elektronifikasi sehingga dapat mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital serta pertumbuhan ekonomi nasional.

## Perkembangan QRIS

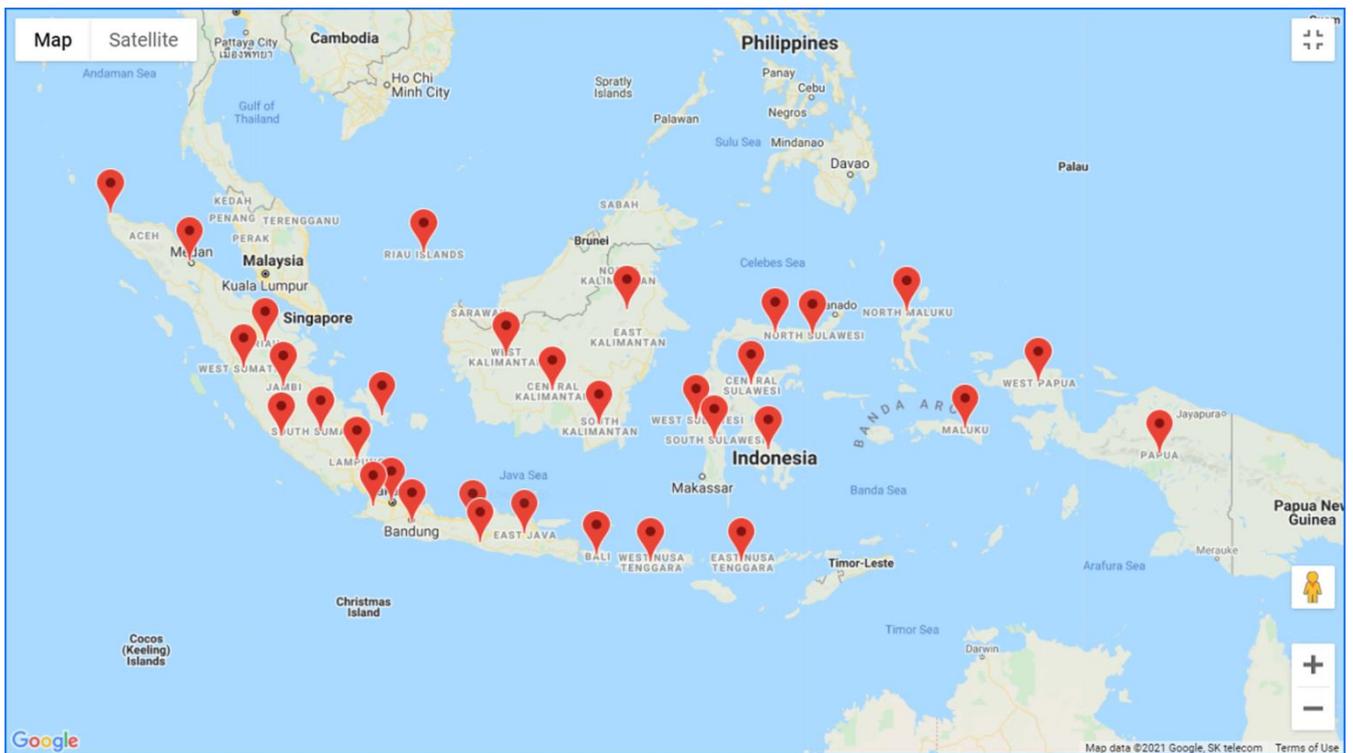
Sejak diluncurkan pada tanggal 17 Agustus 2019, perluasan QRIS telah berlangsung di 34 provinsi dan 480 kota/kabupaten di seluruh Indonesia (Gambar III.1). Transaksi pembayaran menggunakan QRIS pada triwulan I 2021 tumbuh positif yang mencerminkan semakin meningkatnya akseptasi masyarakat. Secara nominal, transaksi QRIS tumbuh 13,62% (qtq) sehingga mencapai Rp3,42 triliun. Hal ini sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan volume transaksi QRIS sebesar 10,23% (qtq) sehingga mencapai 46,97 transaksi (Grafik III.5).

Perkembangan transaksi QRIS didukung oleh jumlah *merchant* QRIS yang per 23 April 2021 telah mencapai 6,89 juta *merchant* yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan 85% diantaranya adalah pelaku usaha mikro dan kecil. Pangsa pasar volume transaksi *merchant* kategori mikro dari semula 13,71% pada triwulan IV 2020 menjadi 13,98% pada triwulan I 2021. Hal ini diindikasikan merupakan dampak dari kebijakan Bank Indonesia yang menetapkan *Merchant Discount Rate* sebesar 0% bagi usaha mikro.

Interkoneksi antar penyedia jasa pembayaran juga semakin menguat yang tercermin dari meningkatnya persentase transaksi *off-us* dari 34% pada triwulan IV 2020 menjadi 36% pada triwulan I 2021. Jumlah penyedia jasa pembayaran (PJP) berizin QRIS saat ini mencapai 62 yang terdiri dari 35 bank dan 27 non bank, termasuk 4 penyelenggara *switching*. Selain itu terdapat beberapa PJP yang melakukan kerjasama co-branding dengan PJP lainnya. Ticket size QRIS juga mengalami sedikit peningkatan dari semula Rp70.667 pada triwulan IV 2020 menjadi Rp72.747 pada triwulan I 2021.

Saat ini implementasi QRIS masih menggunakan model bisnis QRIS *merchant presented mode* (QRIS MPM) yakni *merchant* menampilkan QR Code pembayaran untuk dipindai oleh pembeli ketika melakukan transaksi pembayaran. Selanjutnya, pengembangan QRIS akan dilakukan untuk model bisnis *customer presented mode* (QRIS CPM) yang pada awal Maret 2021 telah selesai diuji coba dalam sandbox Bank Indonesia dengan hasil positif untuk selanjutnya dilakukan persiapan implementasi. Selain itu, uji coba juga akan dilakukan untuk pengembangan QRIS *cross border* dan QRIS Transfer Tarik Setor (QRIS TTS) pada tahun 2021.

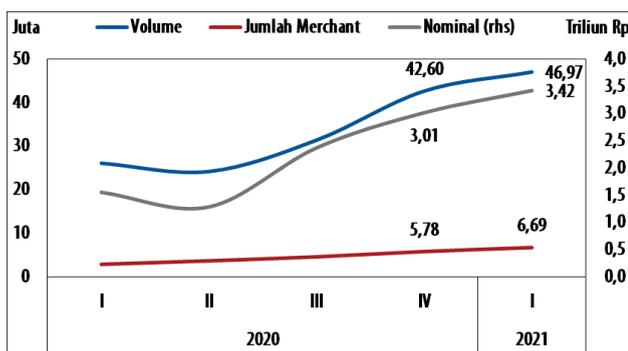
Berbagai kebijakan telah ditempuh oleh Bank Indonesia untuk mendukung percepatan digitalisasi dan pemulihan ekonomi nasional termasuk diantaranya kebijakan terkait QRIS yaitu penerapan MDR QRIS 0% bagi usaha mikro hingga 31 Desember 2021, serta penurunan MDR QRIS bagi Badan Layanan Umum dan *Public Service Obligation* dari semula 0,7% menjadi 0,4% yang akan berlaku sejak 1 Juni 2021. Hal ini diharapkan dapat memperluas akseptasi QRIS.



Sumber: PT. Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional (PTEN)

**Gambar III.1.** Sebaran Merchant QRIS di Wilayah Indonesia

Disamping itu, sinergi dan kolaborasi dari semua kalangan dan stakeholders, baik BI, Pemerintah, pelaku usaha, industri, asosiasi serta kalangan masyarakat, dalam mendukung digitalisasi melalui pemanfaatan QRIS juga diperkuat. Sinergi tersebut juga sekaligus ditujukan untuk membantu pemulihan ekonomi nasional, khususnya melalui program *flagship* Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) dan Gerakan Bangga Berwisata Indonesia (GBWI) yang digulirkan oleh Pemerintah, serta program QRIS 12 juta *merchant* yang diinisiasikan oleh Bank Indonesia.



Sumber: Laporan PJSP dan PTEN

**Grafik III.5.** Perkembangan Transaksi dan Merchant QRIS

Implementasi QRIS diyakini dapat menjadi *game changer* dalam penyediaan layanan pembayaran digital khususnya pada masa pandemi COVID-19. Kebijakan sistem pembayaran dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional diarahkan untuk tetap menjamin ketersediaan dan kelancaran layanan dan infrastruktur serta keamanan transaksi pembayaran secara *end-to-end*.

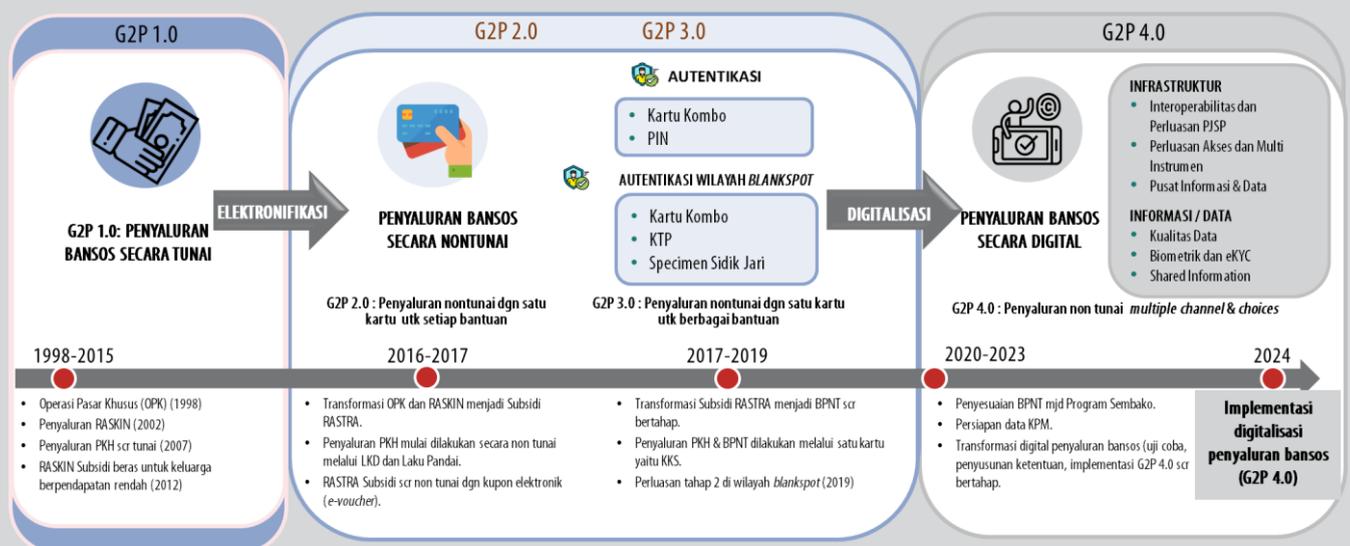
## Digitalisasi Bantuan Sosial untuk Optimalisasi Efisiensi dan Efektivitas Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial

Seiring tren digitalisasi dan upaya optimalisasi efisiensi dan efektivitas penyaluran dan pemanfaatan dana bansos, Pemerintah melalui RPJMN 2020 – 2024 menginisiasi transformasi digitalisasi bantuan sosial (bansos) atau disebut dengan G2P 4.0. Transformasi bansos semakin relevan di tengah kondisi pandemi karena penggunaan teknologi digital mendukung pencegahan penularan COVID-19 melalui transaksi dana bansos yang dapat dilakukan tanpa bersentuhan secara fisik.

Digitalisasi bansos dengan perluasan alternatif kanal pembayaran juga mendorong pemanfaatan dana bansos melalui telepon genggam, sehingga dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kapabilitas keuangan penerima bansos. Dengan media telepon genggam, penerima bansos

menjadi lebih fleksibel karena dapat bertransaksi kapan dan di mana saja. Bagi penerima bansos yang merupakan pelaku UMKM, penggunaan perangkat *mobile* dapat membantu peningkatan aktivitas transaksi sekaligus pemasaran melalui *chatting platform* atau media sosial.

Sebagai bagian dari proses evolusi bansos, transformasi melalui digitalisasi diharapkan akan meningkatkan upaya mencapai prinsip 6 T, yaitu Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, Tepat Harga, dan Tepat Administrasi. Penyaluran bansos yang telah berevolusi dari tunai menjadi nontunai dan kini menggunakan satu kartu untuk berbagai bantuan, kedepan akan dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi digital (Gambar III.2).



Sumber: Bank Indonesia

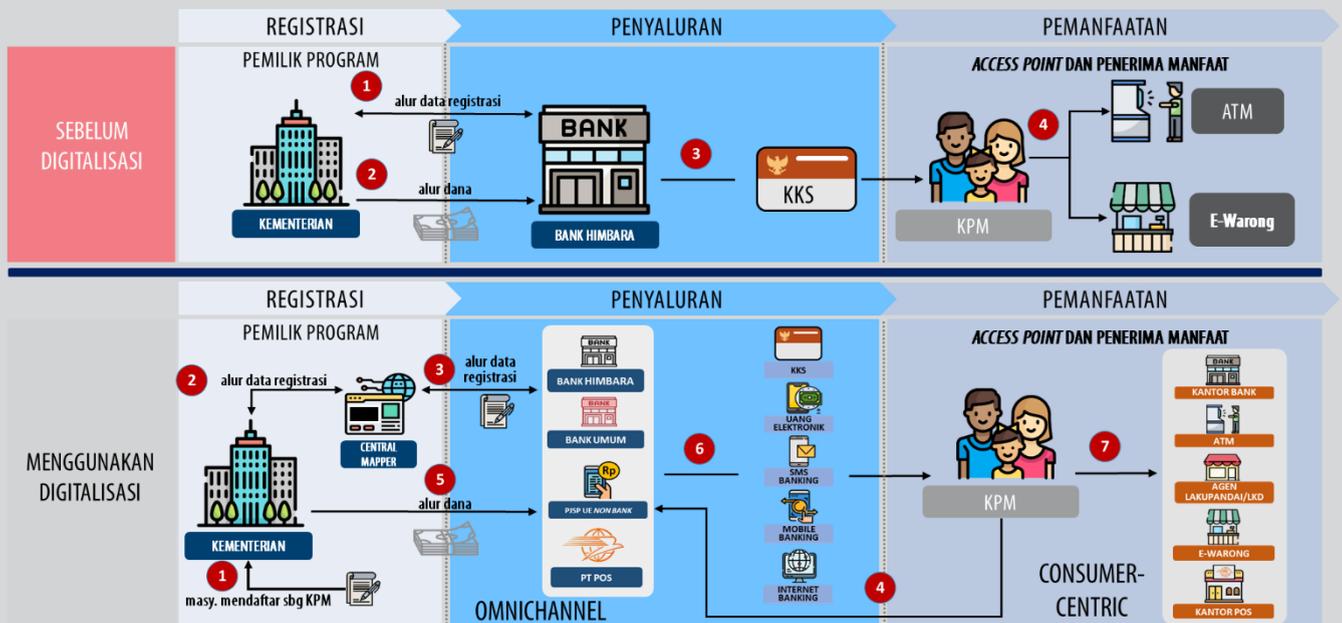
Gambar III.2. Journey Bansos

Digitalisasi bansos dikembangkan dengan mengedepankan prinsip *omni-channel*, *consumer centric*, *fairness*, dan tersedianya *shared infrastructure*. Prinsip *Omni-channel* diartikan penyaluran bansos dilakukan dengan memanfaatkan perluasan/variasi instrumen/kanal pembayaran yang dapat dipilih oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) seperti ATM/D, uang elektronik, SMS banking, maupun media lainnya. Sementara itu akses dana dapat menggunakan alat pembayaran berbasis kartu atau memanfaatkan *featured phone* atau *smartphone*. Prinsip *consumer centric* memberikan kebebasan bagi penerima bansos untuk memilih rekening dan instrumen/kanal

pembayaran yang digunakan untuk memanfaatkan dana bansos. Penerima bansos dapat mentransaksikan dana bansos pada ATM, kantor cabang, agen LKD dan atau Laku Pandai, atau langsung mentransaksikannya pada *merchant* untuk pembelian barang sesuai dengan ketentuan. Mekanisme yang berorientasi pada konsumen ini akan meningkatkan kemudahan dan kenyamanan penerima bansos melalui beragam pilihan. Prinsip *fairness* ditujukan untuk mendukung sustainability layanan pembayaran bansos melalui pengembangan skema insentif bisnis yang wajar dan terjangkau. Prinsip *shared infrastructure* mendorong pengembangan infrastruktur data dan informasi

terintegrasi yang dapat diakses bersama oleh Kementerian/Lembaga untuk efisiensi dan kelancaran

proses penyaluran, serta memitigasi risiko perbedaan data antara Pusat dan Daerah (Gambar III.3).



Sumber: Bank Indonesia

Gambar III.3. Model Bisnis Digitalisasi Bansos

Dalam rangka mendukung digitalisasi bansos, transformasi sejumlah kebijakan juga perlu dilakukan, antara lain 1) perluasan lembaga penyalur yang nantinya akan terbuka bagi penyedia jasa pembayaran berupa bank nonHimbara dan Lembaga Selain Bank, serta 2) perluasan outlet tempat transaksi penerima bansos. Kedua hal ini merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem pembayaran nontunai untuk mendukung keberhasilan dan sustainabilitas G2P 4.0. Ekosistem tersebut mencakup pelaku di ekosistem pembayaran bansos nontunai, yaitu penyedia jasa pembayaran, penerima manfaat, outlet tempat pemanfaatan dana bansos, seperti *agent banking* dan *merchant*. Untuk mendukung pengembangan ekosistem dimaksud, Bank Indonesia memberikan dukungan, khususnya dari aspek sistem pembayaran, antara lain:

- a. Melalui sejumlah inisiatif sebagaimana tertuang dalam *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BPSP) 2021, yaitu i) pengembangan Open Application Programming Interface (Open API) untuk *interlink* bank dan fintech, ii) pengembangan QRIS sebagai kanal pembayaran yang terinterkoneksi, dan iii) implementasi BI-FAST sebagai infrastruktur sistem pembayaran ritel yang akan memproses layanan pembayaran secara *real time*, 24 Jam sehari dan 7 hari seminggu (24/7), terjangkau, dan

mudah diakses dari berbagai kanal.

- b. Penguatan sistem pembayaran, yaitu mendorong kesiapan penyedia sistem pembayaran untuk memperluas lembaga penyalur bansos, mendorong interoperabilitas, memperluas instrumen dan kanal, serta memperluas tempat transaksi (agen dan *merchant*).
- c. Penguatan dari sisi regulasi, pengawasan, dan perizinan, diantaranya melalui penerbitan PBI Sistem Pembayaran pada Desember 2020 lalu yang akan memayungi penataan ekosistem SP dalam menciptakan efisiensi dan mendorong *governance* dalam pelaksanaan elektronifikasi.

Sementara itu, dari sisi Infrastruktur, ketersediaan dan kehandalan jaringan telekomunikasi di Indonesia menjadi tulang punggung digitalisasi dan *enabler factor* bagi implementasi G2P 4.0 di Indonesia

Sebagai studi awal, pada tahun 2020 telah dilakukan survei<sup>2</sup> kepada penerima bansos untuk mengetahui potensi penggunaan telepon genggam dalam penyaluran bansos. Survei dilakukan kepada 2.109 responden penerima bansos (PKH dan program sembako) dan 635 e-warung di 46 wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Berdasarkan survei diperoleh hasil bahwa mayoritas penerima bansos (68%) telah memiliki telepon genggam.

<sup>2</sup> Hasil survei dimuat dalam Laporan *Monitoring* DPSP bersama KPwDN, Tahun 2020

Dari pangsa tersebut, sebanyak 54% memiliki telepon genggam berjenis *smartphone*, 42% berjenis *featured phone*, dan 4% keduanya. Sementara itu, hampir seluruh responden agen e-warong memiliki telepon genggam (98%). Dari pangsa tersebut tersebut, sebanyak 80% e-warong memiliki telepon genggam berjenis *smartphone*, 7% *featured phone*, dan 13% keduanya.

Dengan mempertimbangkan area pengembangan digitalisasi bansos yang cukup luas dan juga kesiapan para pihak, saat ini Kementerian/Lembaga bersama dengan Bank Indonesia tengah menyusun *roadmap* yang mencakup penyusunan kajian, uji coba dan evaluasi, perubahan ketentuan pendukung, dan sosialisasi. Uji coba merupakan tahap yang sangat penting sebelum implementasi penuh untuk melihat implementasi model bisnis di lapangan dan mengetahui kendala serta risiko yang timbul agar dapat dirumuskan langkah solusi dan mitigasi. Implementasi digitalisasi bansos secara nasional ditargetkan dilakukan pada tahun 2024.

## TP2DD Sebagai Katalisator Percepatan dan Perluasan Digitalisasi di Daerah

Dalam rangka mengakselerasi program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), yang saat ini diprioritaskan pada Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), salah satu kunci keberhasilan untuk mewujudkannya adalah melalui koordinasi. Hal ini mempertimbangkan aspek ETPD yang luas sehingga dibutuhkan kolaborasi para pemangku kepentingan, yaitu antara Pemerintah, Bank Indonesia, dan otoritas terkait lainnya, serta pelaku industri. Selain itu, penguatan koordinasi juga diperlukan antara Pusat dan Daerah. Penguatan koordinasi level Pusat dilakukan melalui pembentukan Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) yang terdiri dari Menko Perekonomian selaku Ketua dan beranggotakan Gubernur Bank Indonesia, Menteri dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Sementara itu, di tingkat daerah, penguatan koordinasi dilakukan melalui pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

TP2DD merupakan forum koordinasi antarinstansi dan pemangku kepentingan terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dibentuk untuk mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan ETPD, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi. TP2DD berperan sebagai perpanjangan tangan kebijakan dari Pusat agar diimplementasikan dengan baik di daerah. Secara umum fungsi TP2DD adalah mengimplementasikan kebijakan ETPD, melakukan asesmen, monitoring dan evaluasi atas implementasi ETPD, merumuskan usulan kebijakan baik untuk di daerah masing-masing maupun masukan untuk Satgas P2DD, serta melakukan sosialisasi dan edukasi kepada aparat dan masyarakat umum. Pembentukan TP2DD ditetapkan melalui keputusan kepala daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

TP2DD pertama kali dibentuk oleh Pemda Kabupaten Sleman pada 16 Maret 2020, yang kemudian diikuti 18 Pemda membentuk TP2DD sepanjang tahun 2020. Menginjak tahun 2021, pembentukan TP2DD semakin gencar dilakukan, tercatat 52 TP2DD terbentuk hingga 5

Maret 2021. Penerbitan Keputusan Presiden RI No. 3 Tahun 2021 tentang Satgas P2DD pada 5 Maret 2021 semakin mendorong Pemda untuk membentuk TP2DD. *Launching* P2DD pada pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2021, 5 April 2021, juga menjadi momentum sejumlah daerah untuk membentuk TP2DD. Hingga 20 April 2021 tercatat 217 dari total 542 Pemda di Indonesia telah membentuk TP2DD yang terdiri dari 23 TP2DD Provinsi, 143 TP2DD Kabupaten dan 51 TP2DD Kota. Pembentukan TP2DD seluruh Pemda diharapkan dapat tercapai sebelum 5 Maret 2022 mendatang, sebagaimana yang diamanatkan dalam Keppres No.3 Tahun 2021 bahwa seluruh Pemda wajib membentuk TP2DD paling lambat satu tahun sejak Keppres tersebut diterbitkan.

Meskipun sebanyak 40% Pemda di Indonesia telah berhasil membentuk TP2DD, dalam perjalanannya masih terdapat beberapa kendala. Pemahaman Pemda terkait digitalisasi masih menjadi isu utama. Selain itu, komitmen Pemda untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi di daerah juga menjadi hal yang sangat penting dalam penguatan koordinasi di daerah. Lebih lanjut, payung hukum terkait uraian tugas dan keanggotaan TP2DD serta pedoman implementasi ETPD masih dinantikan oleh Pemda.

Oleh karena itu, Bank Indonesia melalui 46 kantor perwakilan yang tersebar di seluruh pelosok negeri terus berupaya mendorong pembentukan TP2DD melalui koordinasi yang kuat bersama Pemda dengan terus memberikan sosialisasi dan edukasi terkait digitalisasi. Di tingkat pusat, Bank Indonesia sebagai bagian dari Satgas P2DD terus mendorong akselerasi penerbitan Permendagri tentang pedoman pembentukan TP2DD dan implementasi ETPD dengan berperan aktif dalam penyusunan substansi Permendagri khususnya terkait sistem pembayaran. Selain itu, dalam rangka meningkatkan antusiasme Pemda untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi di daerah, saat ini Satgas P2DD tengah menyusun konsep dan pedoman *championship* TP2DD. *Championship* diselenggarakan sebagai wujud apresiasi kepada Pemda yang telah berhasil mendorong perluasan digitalisasi, khususnya dalam ETPD, dan sekaligus sebagai upaya mendukung *governance* implementasi ETPD melalui penetapan Pemda terbaik.

Ke depan, sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah, Bank Indonesia, otoritas terkait lainnya, dan pelaku industri akan

terus ditingkatkan melalui penguatan peran Satgas P2DD dan TP2DD. Upaya ini diharapkan mampu mengakselerasi dan memperluas ETPD untuk mendukung optimalisasi peningkatan PAD yang pada akhirnya akan berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi regional dan nasional, perbaikan tata kelola, serta perluasan inklusi keuangan.

*"Halaman ini sengaja dikosongkan"*

# TIM PENYUSUN

**Penanggung Jawab**

Aida S. Budiman

**Koordinator Penyusun**

IGP Wira Kusuma

Widi Agustin S.

**Tim Penulis**

Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter - Grup Sektoral dan Regional

Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran

Kantor Perwakilan BI Prov. Sumatera Utara

Kantor Perwakilan BI Prov. Jawa Timur

Kantor Perwakilan BI Prov. Kalimantan Selatan

Kantor Perwakilan BI Prov. Bali

Kantor Perwakilan BI Prov. Sulawesi Selatan







BANK INDONESIA

Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta 10350 - Indonesia | [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)